



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Pedoman Penyusunan dan Penyediaan

Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.2.1 Maksud.....	4
1.2.2 Tujuan	4
1.3 MANFAAT BASIS DATA PKP	4
1.4 KERANGKA PIKIR	4
1.5 ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II BASIS DATA.....	9
2.1 PENGELOMPOKAN DATA.....	9
2.1.1 Data Menurut Tipenya.....	9
2.1.2 Data Menurut Jenisnya	10
2.1.3 Data Menurut Kontennya	11
2.2 BASIS DATA	12
2.2.1 Data dalam Basis Data.....	12
2.2.2 Pemahaman Mengenai Sistem Informasi.....	13
2.2.3 Peran Basis Data dalam Sistem Informasi	14
BAB III PENYEDIAAN BASIS DATA MINIMAL PKP	17
3.1 LINGKUP PENYEDIAAN BASIS DATA MINIMAL PKP	17
3.2 PENYEDIA BASIS DATA MINIMAL PKP DI DAERAH.....	20
3.2.1 Struktur Penyedia Basis Data Minimal PKP Di Daerah	20
3.2.2 Tugas Dan Fungsi Penyedia Basis Data Minimal PKP	22
3.3 FORUM POKJA PKP	26
BAB IV DATA MINIMAL PKP	27
4.1 LINGKUP ENTITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)	27
4.1.1 Entitas Perumahan.....	27
4.1.2 Entitas Permukiman	27

4.1.3 Entitas Lingkungan Hunian	27
4.1.4 Entitas Kawasan Permukiman.....	27
4.1.5 Entitas dalam Basis Data PKP	28
4.1.6 Kaitan Entitas PKP dengan Konten Data	30
4.2 IDENTIFIKASI DATA MINIMAL PKP.....	31
4.2.1 Proses Identifikasi Data PKP.....	31
4.2.2 Kriteria Penentuan Data Minimal.....	34
4.2.3 Data Minimal PKP	35
4.3 TATA CARA PEROLEHAN DATA MINIMAL PKP.....	79
4.4 DATA MINIMAL PKP DALAM KAITANNYA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI.....	81

BAB V TATA CARA PENGEMBANGAN DATA MINIMAL PKP 83

5.1 UMUM.....	83
5.2 TATA CARA PEMBAHARUAN STRUKTUR DATA MINIMAL PKP	83
5.3 TATA CARA PEMBAHARUAN DATA MINIMAL PKP	87
5.3.1 Umum.....	87
5.3.2 Pembaharuan Data Statistik dan Tematik Lainnya.....	89
5.3.3 Pembaharuan Data Geospasial	91

BAB VI KETENTUAN UMUM PEMBANGUNAN SISTEM BASIS DATA PKP 93

6.1 KETENTUAN UMUM PEMBANGUNAN SISTEM BASIS DATA PKP ...	93
6.1.1 Umum.....	93
6.1.2 Penyiapan Basis Data	93
6.1.3 Pembaharuan Basis Data	97
6.1.4 Implementasi Sistem Baru	97
6.1.5 Uji Sistem	98
6.2 KETENTUAN UMUM PEMELIHARAAN SISTEM BASIS DATA PKP ...	99
6.2.1 Pemeliharaan Konten Data	99
6.2.2 Pemeliharaan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i>	100

BAB VII PEMBIAYAAN DAN SDM 101

7.1 PEMBIAYAAN.....	101
7.2 SDM	102

LAMPIRAN 104

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah mengamanatkan tersedianya Basis Data perumahan dan kawasan permukiman. Di dalam Pasal 16, 17, dan 18, telah dijelaskan salah satu kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan yaitu menyusun dan menyediakan Basis Data perumahan dan kawasan permukiman.

Keberadaan Basis Data yang akurat, lengkap mutakhir dan terbaru menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Basis Data yang berkualitas akan membuat kebijakan, regulasi, strategi, dan program yang dihasilkan menjadi akurat dan tepat. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, monitoring akan lebih mudah dilakukan karena ada data acuan terukur yang valid. Hasil pelaksanaan pembangunan pun dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan hasil perencanaan. Pada akhirnya pengendalian terhadap pembangunan yang tidak terarah / tidak tepat dapat berjalan dengan baik.

Pentingnya Basis Data dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan ketersediaan Basis Data yang baik. Dari berbagai tinjauan lapangan di daerah, terdapat beberapa permasalahan terkait Basis Data yang ditemui, yaitu: 1) tidak ada data; 2) ada data tapi tidak terstandarkan; 3) ada data tapi tidak terorganisir, tidak aman, terjadi duplikasi, dan/atau; 4) ada data tidak terkelola dengan baik.

Keberadaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang akurat, lengkap mutakhir dan terbaru menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi guna menghindari penyusunan kebijakan, regulasi, strategi, dan program yang tidak saling mendukung, bahkan saling bertentangan dan

juga untuk mengetahui tingkat kebutuhan riil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Mengingat strategisnya peran data dan informasi dalam pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, maka diperlukan percepatan penyediaan Basis Data perumahan dan kawasan permukiman. Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari Basis Data tersebut. Dalam menunjang pengambilan keputusan, ketersediaan Basis Data ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas serta efisiensi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman karena mempermudah pencarian data, mempermudah sharing data, data lebih terorganisir, keamanan data lebih terjamin, dan tidak adanya pengulangan/duplikasi dalam penyimpanan data.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat kepada Pemerintah Pusat yaitu a) wewenang menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan; b) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah; serta c) wajib membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam percepatan penyusunan dan penyediaan Basis Data, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjurur Kementerian/Lembaga pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman membuat Pedoman Penyusunan dan Penyediaan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat menjadi panduan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, terutama yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman, dalam membentuk Basis Data perumahan dan kawasan permukiman yang "seragam", informatif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, regulasi, strategi, dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman yang efektif

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari pembuatan Pedoman Penyusunan dan Penyediaan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk mendukung terbangunnya Basis Data PKP di daerah, yang teroganisir, memiliki standar, dan dapat dikelola dengan baik, sebagai acuan dalam penyusunan Regulasi/ Kebijakan/ Strategi/ Perencanaan/ Program di bidang PKP

1.2.2 Tujuan

Pembuatan Pedoman Penyusunan dan Penyediaan Basis Data PKP ditujukan untuk memberikan :

- 1) pemahaman dasar mengenai Basis Data PKP;
- 2) acuan teknis mengenai Basis Data minimal PKP yang harus dipenuhi;
- 3) acuan tugas dan fungsi dari penyelenggara Basis Data PKP; dan
- 4) acuan umum dalam perancangan Sistem Basis Data PKP

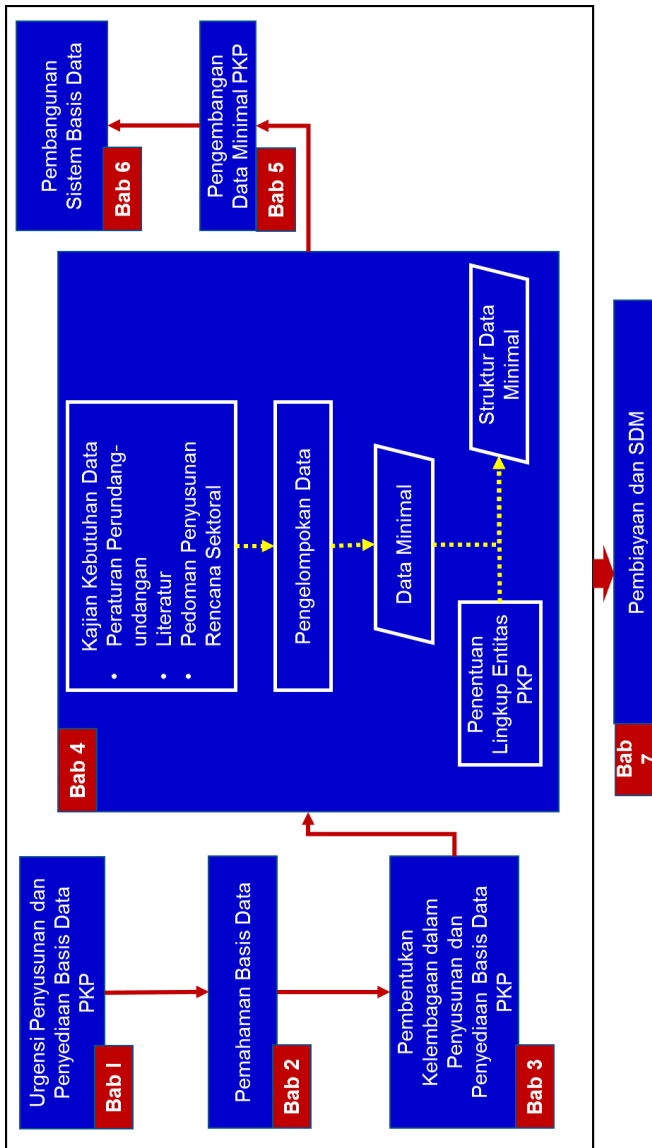
1.3 MANFAAT BASIS DATA PKP

Basis Basis Data PKP bermanfaat sebagai :

1. acuan data PKP dalam perumusan kebijakan, regulasi, strategi, dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman yang efektif di daerah; dan
2. informasi bagi stakeholders di pusat maupun di daerah, terkait kondisi dan rencana bidang perumahan dan kawasan permukiman

1.4 KERANGKA PIKIR

Berikut kerangka pikir yang menggambarkan alur pemahaman tiap bab pembahasan dan keterkaitannya.



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Pedoman

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dijelaskan kerangka pikir pedoman sebagai berikut:

1. Di dalam **Bab I**, diuraikan urgensi dari penyusunan dan penyediaan Basis Data PKP yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah
2. Di dalam **Bab II**, diuraikan pendalaman substansi mengenai Basis Data sebagai rujukan awal mengenai pemahaman substansi
3. Setelah Pemerintah Daerah memahami urgensi dan substansi dari Basis Data, maka sesuai amanat UU PKP, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Kelembagaan Penyedia Basis Data PKP, yang ketentuannya diuraikan dalam **Bab III**
4. Dengan dibentuknya Kelembagaan Penyedia Basis Data PKP, maka penyiapan Basis Data PKP bisa dimulai dengan menggunakan Struktur Data Minimal arahan dari Pusat, yang telah diuraikan prosesnya di dalam **Bab IV**
5. Dalam hal Penyedia Basis Data PKP ingin melakukan pengembangan struktur data baru ataupun data baru, maka Penyedia Basis Data PKP dapat melakukan proses pengembangan data minimal PKP sebagaimana diuraikan dalam **Bab V**
6. Setelah Basis Data Minimal PKP sudah tersusun, maka perlu dibangun Sistem Basis Data PKP sebagaimana diuraikan secara umum dalam **Bab VI**
7. Dalam Penyediaan Basis Data Minimal PKP dibutuhkan dukungan pembiayaan dan SDM, sebagaimana diuraikan dalam **Bab VII** tentang sumber pembiayaan serta upaya peningkatan kapasitas SDM agar Basis Data Minimal PKP dapat dikelola dengan baik

1.5 ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek;

2. Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi;
3. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik;
4. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
5. Metadata adalah Informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola;
6. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu;
7. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi;
8. Standar Format Isian Data adalah standar format yang digunakan pada elemen/*field* tabel data/entitas data yang terstruktur, khususnya terkait data minimal;
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi;
10. Forum Data adalah forum yang beranggotakan pembina data dan Wali Data serta dikoordinasikan oleh koordinator data dalam mengelola Basis Data PKP di wilayah kabupaten/kota;
11. Pembina Data adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembekuan standar data dan metadata jenis tertentu dalam Basis Data PKP di wilayah kabupaten/kota;

12. Wali Data adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan Basis Data PKP di wilayah kabupaten/kota;
13. Koordinator Forum Data adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam forum data PKP di wilayah kabupaten/kota; dan
14. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan data PKP di wilayah kabupaten/kota.

BAB II BASIS DATA

2.1 PENGELOMPOKAN DATA

2.1.1 Data Menurut Tipenya

Pengelompokan data menurut tipenya dilakukan, karena terkait dengan lingkup penggunaan data dalam proses pengambilan kebijakan. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan, di mana data dilihat dari kepentingannya terhadap tahapan perencanaan, yaitu dari tahap pemahaman kondisi eksisting (faktual tanpa analisis), tahap analisis, hingga tahapan rencana.

Berdasarkan proses perencanaan, maka data akan dibagi 3, yaitu:

1. **Data Dasar:** Data yang menggambarkan kondisi eksisting suatu kawasan permukiman menurut tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu.
Contoh: jumlah penduduk, ketenagakerjaan, PDRB, luas wilayah/kawasan, topografi, dan/atau kualitas fisik PSU.
2. **Data Analisis:** Data yang menyajikan hasil pengkajian terhadap data dasar suatu kawasan permukiman yang dapat menggambarkan fenomena tertentu.
Contoh: tingkat kemiskinan, daya dukung kawasan, daya tampung kawasan, potensi pertanian, dan/atau kualitas pelayanan prasarana.
3. **Data Perencanaan:** Data yang menyajikan hasil ketetapan rumusan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
Contoh: Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, rencana sarana, rencana jaringan prasarana, dan/atau rencana pola ruang.

2.1.2 Data Menurut Jenisnya

Pengelompokan data menurut jenisnya sangat terkait dengan kewenangan dari pembinaan data dengan mengacu pada klasifikasi data. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis data, yaitu: 1) Data Statistik; 2) Data Geospasial; dan 3) Data Tematik Lainnya.

Lingkup dari data menurut jenisnya, selain sesuai dengan pengertiannya, maka terdapat beberapa batasan, yang menjadi acuan dalam pengelompokan data menurut jenisnya. Adapun batasannya, dan contoh datanya adalah sebagai berikut :

1. Data Statistik

Data yang dikelompokkan dalam data statistik ini, adalah data yang melalui kegiatan statistik. Batasan pengelompokan data statistik: data numerik yang bukan berupa luasan atau panjang / tidak terkait dengan spasial.

Contoh : jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan/atau mutasi penduduk

1) Data Geospasial

Data yang dikelompokkan dalam data geospasial ini adalah data tentang obyek alam maupun buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Batasan pengelompokan data geospasial: semua data yang keruangan yang memiliki dimensi/ukuran. Contoh: panjang jalan menurut fungsinya, luas kecamatan, dan/atau luas kawasan kumuh

2) Data Tematik Lainnya

Data yang dikelompokkan dalam data tematik lainnya adalah data yang dihasilkan oleh sektor tertentu yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tema pembangunan tertentu. Dalam konteks Basis Data ini, maka data tematik yang dimaksud adalah data penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Batasan pengelompokan data tematik lainnya: semua data sektoral (numerik/non numerik), di luar data yang berdimensi keruangan, dan tidak melalui kegiatan statistik.

Contoh: pembiayaan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan PSU.

2.1.3 Data Menurut Kontennya

Pengelompokan data menurut kontennya dilakukan karena terkait dengan kebutuhan data dalam lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelompokan dilakukan menggunakan pendekatan keterkaitan substansi datanya, dengan tetap merujuk pada pemahaman komponen dari perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada UU No.1 Tahun 2011, dapat diidentifikasi komponen dari perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

1. Komponen Penduduk dan Sosial Ekonominya, yaitu penduduk yang tinggal dan melangsungkan penghidupannya dalam entitas perumahan dan kawasan permukiman
2. Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas, yaitu kelengkapan dasar, fasilitas, dan kelengkapan penunjang yang mengikat entitas perumahan dan kawasan permukiman.
3. Komponen Perumahan, yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari kawasan permukiman
4. Komponen Kawasan Permukiman, yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan pemahaman komponen dari perumahan dan kawasan permukiman, kemudian dapat diidentifikasi kelompok konten data sebagai berikut:

1. Data Penduduk dan Sosial Ekonominya
Data kependudukan menghuni tiap entitas perumahan dan kawasan permukiman dengan karakteristik sosial ekonominya.
Contoh : jumlah penduduk miskin, daya tampung penduduk total, dan/atau indeks pembangunan manusia
2. Data Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
Data PSU meliputi :

- a. Data Prasarana, yaitu data terkait kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Contoh : jumlah IPAL, jumlah TPS

- b. Data Sarana, yaitu data terkait fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi

Contoh : jumlah sarana pendidikan, sarana kesehatan

- c. Data Utilitas, yaitu data terkait kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.

Contoh : panjang jaringan gas, panjang jaringan telekomunikasi

3. Data Perumahan

Data mengenai rumah menurut jenis dan bentuknya, yang berada dalam kawasan permukiman.

Contoh : Jumlah rumah komersial, jumlah rumah susun

4. Data Kawasan Permukiman (lahan permukiman dan fungsi ruang budidaya lainnya)

Data mengenai tapak/lahan serta bangunan tempat kegiatan pendukung sebagai pengisi dari tiap entitas perumahan dan kawasan permukiman.

Contoh : Luas tutupan lahan permukiman, ketentuan intensitas bangunan, luas peruntukan pertanian

Sejalan dengan kebijakan percepatan satu peta nasional, maka substansi data yang berupa ukuran luas dan panjang, diarahkan untuk menggunakan data geospasial.

2.2 BASIS DATA

2.2.1 Data dalam Basis Data

Sebagaimana telah diuraikan dalam istilah dan definisi, Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan

dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan beberapa kriteria dari basis data, yaitu:

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented
2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis data -nya
3. Dapat berkembang dengan mudah, baik secara volume maupun strukturnya
4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem – sistem baru secara mudah
5. Dapat digunakan dengan cara – cara yang berbeda
6. Kerangkapan data (*data redundancy*) minimal

Dari penjelasan di atas, dapat diartikan data disimpan didalam Basis Data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Basis Data mengorganisasikan data di dalamnya sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas.

2.2.2 Pemahaman Mengenai Sistem Informasi

Menurut Permen PUPR No.17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi. Mekanisme kerja dalam pengelolaan data dan informasi ini dapat diibaratkan sebagai blok bangunan sistem informasi, yang terdiri dari elemen sebagai berikut:

1. Blok Masukan (*input block*)
Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
2. Blok Model (*model block*)
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di Basis

Data dengan cara tertentu, untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan

3. Blok Keluaran (*output block*)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi (*technology block*)

Teknologi merupakan “*tool box*” dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu teknisi (*brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*).

5. Blok Basis Data (*basis data block*)

Basis Data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam Basis Data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam Basis Data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Basis Data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS (*Basis Data Management System*).

6. Blok kendali (*control block*)

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, kegagalan sistem, kecurangan-kecurangan, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi, kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

2.2.3 Peran Basis Data dalam Sistem Informasi

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab 2.2.2, bahwa Basis Data merupakan salah satu komponen dari Sistem Informasi. Terkait dengan

fungsinya dalam Sistem Informasi, maka terdapat beberapa peran dari Basis Data, yaitu:

1. Basis Data sebagai komponen Sistem Informasi
Keberhasilan suatu Sistem Informasi sangat dipengaruhi oleh Sistem Basis Data. Karena itu sangatlah penting menyusun Sistem Basis Data yang baik, yang mampu memenuhi segala kebutuhan data atau informasi penggunaannya. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam Basis Data, maka semakin meningkatkan kualitas Sistem Informasi itu sendiri.
2. Basis Data sebagai infrastruktur Sistem Informasi
Basis Data menyediakan suatu sarana infrastruktur kepada organisasi-organisasi Sistem Informasi yang dibangun, yang meliputi sistem pengolahan transaksi, sistem informasi, dan sistem pendukung keputusan. Dalam konteks sistem pengolahan transaksi, relasi data dalam Basis Data akan menentukan transaksi yang dapat dijalankan dalam Sistem Informasi. Dalam konteks Sistem Informasi, Basis Data yang akurat akan menentukan kualitas dari Sistem Informasi. Sementara dalam konteks sistem pendukung keputusan, Basis Data yang berkualitas dapat menentukan apakah keputusan yang diambil terkait upaya pembangunan akurat dan tepat.
3. Basis Data sebagai sumber informasi dalam Sistem Informasi
Sebagaimana diketahui, bahwa Basis Data mengorganisasikan data di dalamnya sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Dengan demikian maka sumber informasi bagi pemakai Sistem Informasi adalah Basis Data itu sendiri.
4. Basis Data sebagai sarana untuk efisiensi Sistem Informasi
Penggunaan Basis Data dalam Sistem Informasi akan memberikan efisiensi bagi Sistem Informasi itu sendiri. Efisiensi yang dicapai meliputi efisiensi dalam penggunaan waktu, kertas kerja, tenaga / personalisa, serta biaya. Efisiensi diperoleh karena Basis Data

dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan berbagai macara cara oleh pemakai, baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimkan kerangkapan data, memudahkan untuk modifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya.

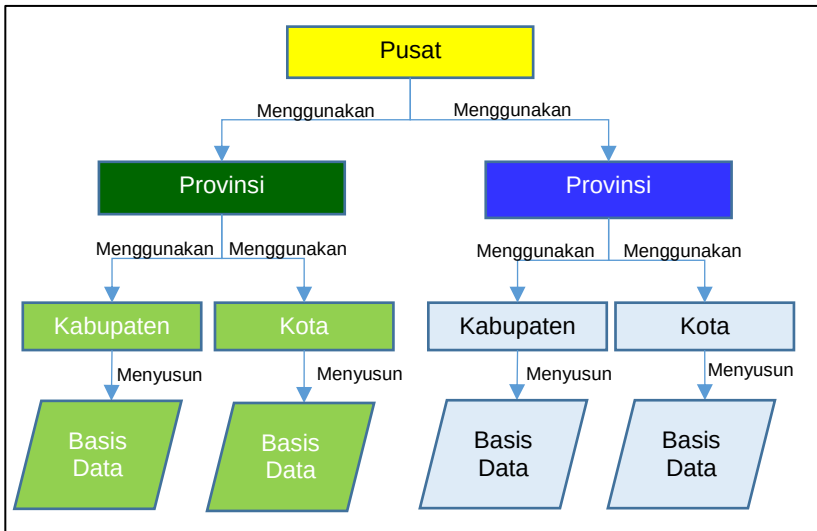
5. Basis Data sebagai sarana untuk efektivitas Sistem Informasi
Basis Data memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas Sistem Informasi, karena data-data yang disusun dan disimpan adalah data yang sudah valid, perangkat lunak yang ada dan digunakan di dalamnya juga telah diuji kebenarannya.

BAB III PENYEDIAAN BASIS DATA MINIMAL PKP

3.1 LINGKUP PENYEDIAAN BASIS DATA MINIMAL PKP

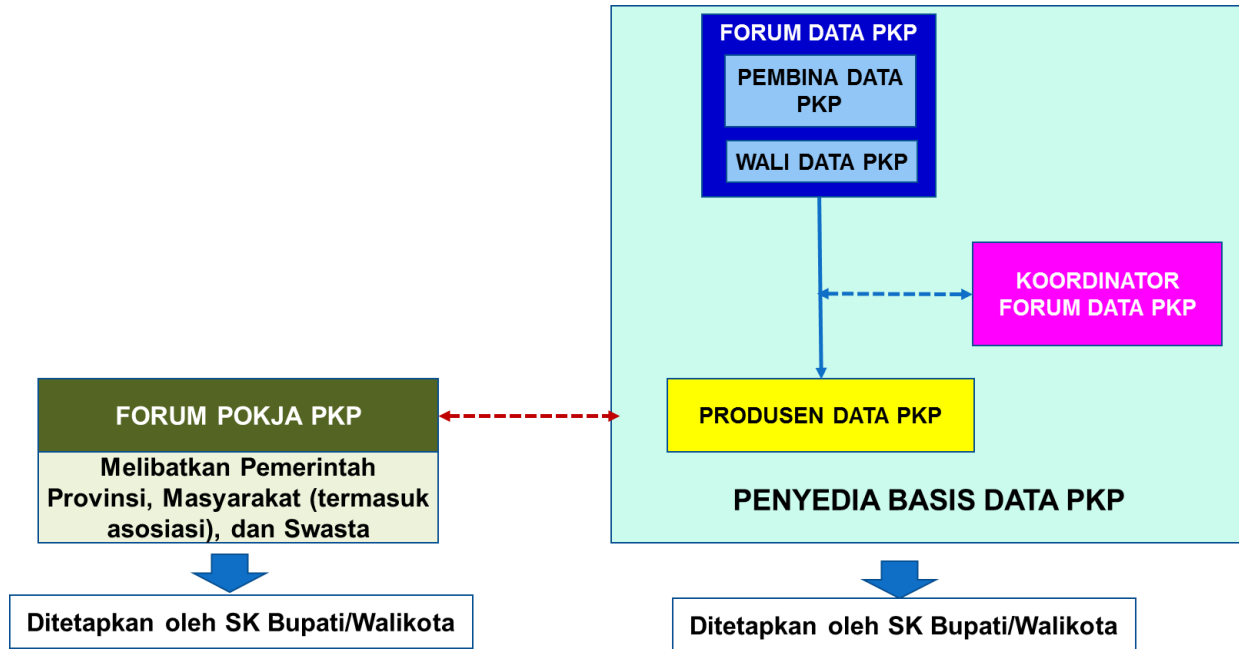
Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penyusunan dan penyediaan Basis Data merupakan kewenangan Pemerintah (pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adanya memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar (termasuk di dalamnya perumahan dan kawasan permukiman), maka penyediaan basis data yang menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, diarahkan untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota.

Adapun basis data untuk tingkat provinsi dapat menggunakan basis data pada tingkat kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayahnya. Sementara basis data pusat menggunakan basis data tiap provinsi yang ada. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat data yang merupakan penjumlah data pada lingkup data di bawahnya.



Gambar 3. 1 Lingkup Penyediaan Basis Data Minimal PKP

Langkah pertama dalam penyediaan basis data minimal PKP di daerah, maka setiap daerah harus membentuk kelembagaan Penyedia Basis Data PKP. Struktur kelembagaan Penyedia Basis Data PKP ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, yang secara jelas menetapkan Perangkat Daerah/Instansi yang mengisi struktur kelembagaan, tugas dan fungsinya, dan mekanisme kerjanya. Dalam penyediaan basis data minimal PKP, Pemda melibatkan *stakeholders* terkait lainnya melalui mekanisme koordinasi dalam Forum Pokja PKP yang telah ada.



Gambar 3. 2 Sistem Kelembagaan dalam Penyediaan Basis Data Minimal PKP

Dalam penyediaan basis data PKP di daerah, Penyedia Basis Data PKP dapat menggunakan struktur dan data minimal PKP sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab 4.2.4, maupun melakukan pengembangan sebagaimana ketentuan yang diuraikan dalam Bab 5.

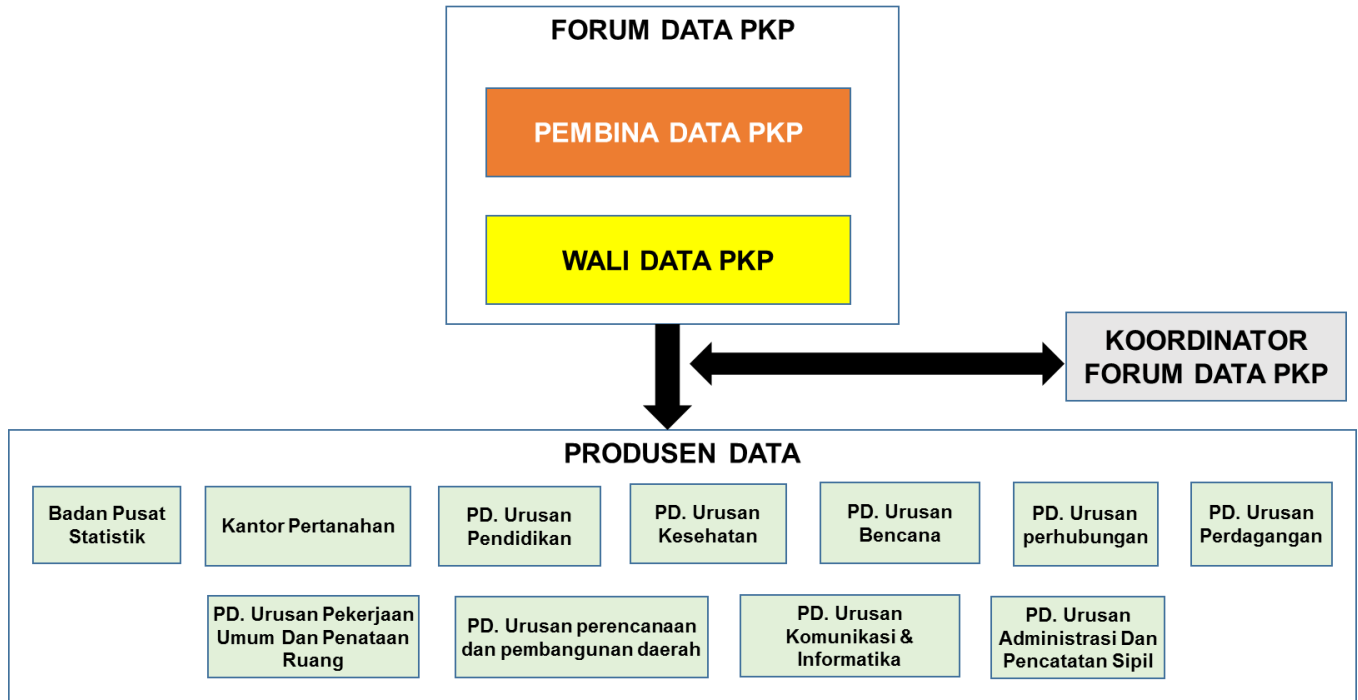
3.2 PENYEDIA BASIS DATA MINIMAL PKP DI DAERAH

3.2.1 Struktur Penyedia Basis Data Minimal PKP Di Daerah

Struktur penyedia Basis Data minimal PKP di Daerah dirumuskan dengan merujuk pada struktur penyelenggara Satu Data di daerah. Penyedia Basis Data Minimal PKP di Daerah meliputi:

1. Forum Data
Forum Data beranggotakan :
 - a. Pembina Data; dan
 - b. Wali Data
2. Pembina Data
Pembina Data mencakup :
 - a. Pembina Data untuk Data Statistik
 - b. Pembina Data untuk Data Geospasial
 - c. Pembina Data untuk Data Tematik Lainnya, dalam hal ini Data PKP
3. Wali Data
4. Koordinator Forum Data
5. Produsen Data.

Secara skematis, struktur penyedia Basis Data Minimal PKP di Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 3 Struktur Penyedia Basis Data Minimal PKP di Daerah

3.2.2 Tugas Dan Fungsi Penyedia Basis Data Minimal PKP

A. Forum Data

Forum Data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan basis data;
2. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis pengelolaan basis data;
3. menyusun rencana aksi tahunan pengelolaan basis data;
4. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan basis data;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan pengelolaan basis data.

Kebijakan teknis pengelolaan basis data yang diputuskan dalam Forum Data adalah :

1. Data untuk bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar kabupaten/kota, antara provinsi dengan kabupaten/kota, antara pusat dengan kabupaten/kota;
2. Tingkat keterbukaan data;
3. Kode referensi data (kode wilayah/kode data jika menggunakan kode data);
4. Pembina Data untuk jenis data tematik lainnya, dalam hal ini data PKP
5. Portal Basis Data yang digunakan;
6. Penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis penyediaan Basis Data.

B. Pembina Data

Pembina Data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. memastikan pengelolaan basis data PKP di wilayah kabupaten/kota;
2. bersama Produsen Data dan Wali Data menentukan standar data dan metadata;
3. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Wali Data;

4. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal daerah dengan Wali Data untuk mencegah duplikasi data.

Penetapan Pembina Data di daerah mengikuti arahan dari Satu Data Indonesia, yaitu :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagai Pembina Data untuk Data Statistik
 - 1) Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota dalam Jaringan Informasi Geospasial sebagai Pembina Data untuk Data Geospasial; dan
 - 2) Perangkat Daerah yang mengurus Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Pembina Data PKP.

C. Wali Data

Wali Data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menentukan standar data dan metadata untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Produsen Data dan Pembina Data;
2. mengusulkan kebijakan teknis pengelolaan basis data yang akan ditetapkan oleh Produsen Data;
3. menerima data yang disampaikan oleh Produsen Data;
4. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
5. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
6. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan; dan
7. memperhatikan kebutuhan data dari perangkat daerah terkait dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data.

Penetapan Pembina Data di daerah mengikuti arahan dari Satu Data Indonesia, yaitu Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan data.

D. Koordinator Forum Data

Koordinator Forum Data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. memastikan kegiatan forum data berjalan dengan baik;
2. menyampaikan hasil kebijakan teknis pengelolaan basis data kepada produsen data;
3. menyampaikan rencana aksi tahunan pengelolaan basis data kepada produsen data; dan
4. menyampaikan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan basis data kepada produsen data.

Penetapan Pembina Data di daerah mengikuti arahan dari Satu Data Indonesia, yaitu Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan di daerah.

E. Produsen Data

Produsen Data memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan Wali Data dan Pembina Data untuk meneruskan standar data dan metadata untuk data yang akan disusun, dikumpulkan, dan diolah;
2. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data sesuai dengan standar data, format metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
3. menyampaikan data kepada Wali Data beserta metadata yang melekat pada data tersebut;
4. memberikan masukan kepada Wali Data terkait pelaksanaan kebijakan terkait data PKP, yang perlu dibahas dalam Forum Data PKP; dan
5. menindaklanjuti rekomendasi dari Wali Data atas kebutuhan data dari perangkat daerah dan masyarakat.

Produsen data menurut kewenangan/tusi produksi datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Produsen Data dan Indikasi Data yang Dihasilkan

NO.	PRODUSEN DATA	DATA
1	BPS	• Statistik Dasar Penduduk • Statistik Dasar Pertanian • Statistik Dasar Ekonomi
2	PD. urusan administrasi dan pencatatan sipil	Data pencatatan penduduk (mutasi, rumah tangga)
3	Kantor Pertanahan	Data Tanah
4	PD. urusan perumahan dan Kawasan Permukiman	• Data Perumahan • Data Kawasan Permukiman
5	PD. urusan pendidikan	Data Sarana Pendidikan
6	PD. urusan kesehatan	Data Sarana Kesehatan
7	PD. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	• Data Prasarana Jalan • Data Prasarana Air Minum • Data Prasarana Drainase • Data Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah • Data Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan • Data Rencana Tata Ruang
8	PD. Urusan bencana	Data Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran
9	PD. Urusan perhubungan	Data Prasarana Perhubungan Darat, Laut, dan Udara
10	PD. Urusan Komunikasi dan Informatika	Data Jaringan Telekomunikasi
11	PD. Urusan	Data Sarana Perdagangan dan Jasa

NO.	PRODUSEN DATA	DATA
	Perdagangan	
12	PD. Urusan perencanaan dan pembangunan daerah	• Data Jaringan Listrik • Data Jaringan Gas

3.3 FORUM POKJA PKP

Berdasarkan PP No.14 Tahun 2016, Pokja PKP adalah lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman. Pokja PKP sebagai *think tank* kebijakan, wadah koordinasi dan kolaborasi, bukan mengambil alih tugas Perangkat Daerah (PD).

Forum Pokja PKP perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan data PKP, mengingat di satu sisi beberapa data dimiliki oleh masyarakat/swasta, sementara di sisi lainnya, tugas dari penyediaan basis data PKP ini menjadi tugas dari Pemerintah. Dengan dilibatkannya Pokja PKP, maka diharapkan setiap produsen data dapat berkoordinasi dengan pihak masyarakat/swasta yang memiliki beberapa data spesifik.

Hal ini juga sejalan dengan tugas dari Pokja PKP sendiri, sebagaimana dapat dilihat pada skema berikut ini.



Gambar 3. 4 Peran Pokja PKP dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BAB IV DATA MINIMAL PKP

4.1 LINGKUP ENTITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)

4.1.1 Entitas Perumahan

Menurut UU No.1 Tahun 2011, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Penentuan satuan perumahan menggunakan pendekatan unit lingkungan pada tingkat Rukun Warga (RW).

4.1.2 Entitas Permukiman

Menurut UU No.1 Tahun 2011, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Penentuan satuan permukiman menggunakan pendekatan administratif pemerintahan terkecil, yaitu kelurahan / desa.

4.1.3 Entitas Lingkungan Hunian

Menurut UU No.1 Tahun 2011, Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Penentuan satuan permukiman menggunakan pendekatan administratif pemerintahan kecamatan.

4.1.4 Entitas Kawasan Permukiman

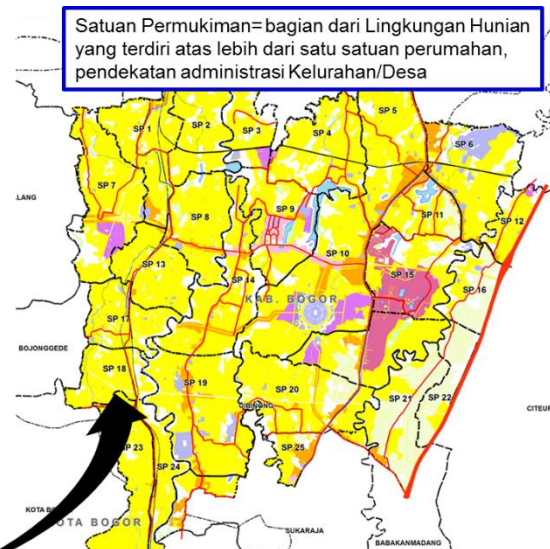
Menurut UU No.1 Tahun 2011, Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan. Penentuan satuan permukiman menggunakan pendekatan administratif pemerintahan kabupaten/kota.

4.1.5 Entitas dalam Basis Data PKP

Dalam Basis Data PKP ini, akan direkomendasikan 3 (tiga) entitas, yaitu entitas kawasan permukiman, lingkungan hunian, dan permukiman. Hal ini dikarenakan: 1) rujukan awal data pada tingkat perencanaan masih pada entitas permukiman; 2) entitas permukiman dengan pendekatan kelurahan/desa adalah pendekatan yang sudah lebih kuat karena bersifat administratif terkecil. Entitas perumahan kemudian dileburkan dalam entitas permukiman, namun keterwakilan datanya akan dimasukkan dalam Konten Data Perumahan.

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

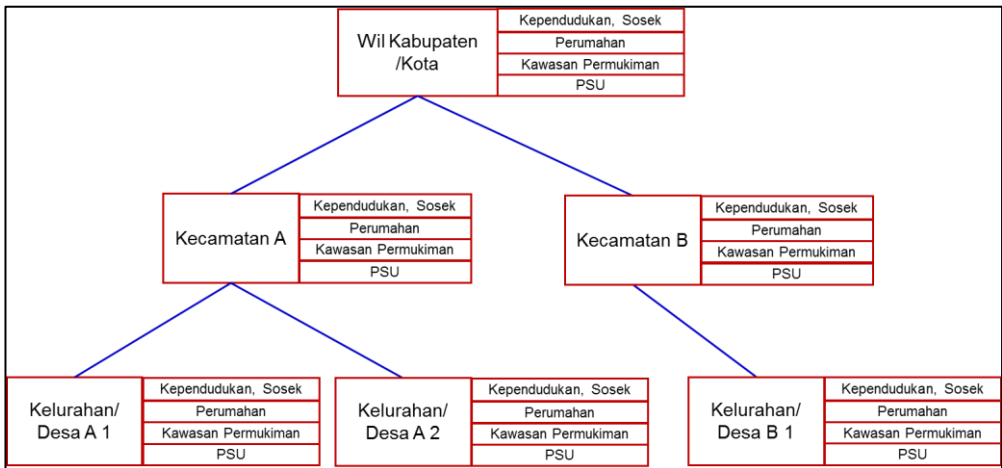


Gambar 4. 1 Lingkup Entitas PKP yang Direkomendasikan

4.1.6 Kaitan Entitas PKP dengan Konten Data

Istilah entitas tidak hanya dikenal dalam lingkup spasial. Di dalam Basis Data juga dikenal istilah entitas. Entitas bisa berupa tempat, kejadian, konsep, atau orang yang datanya direkam. Setiap entitas memiliki sebutan untuk mewakili suatu entitas, yang disebut atribut. Atribut tiap entitas inilah yang kemudian berisi data yang telah diklasifikasi menurut kontennya. Sebagai contoh : tiap entitas (kawasan permukiman, lingkungan hunian, dan permukiman) memiliki data menurut konten: penduduk dan sosial ekonomi, PSU, perumahan, dan kawasan permukiman.

Kaitan antara entitas PKP dengan konten data membentuk struktur data, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 5 Skema Struktur Data

Terkait dengan konten data pada tiap entitas, maka terdapat sifat data yang harus diperhatikan, yaitu:

1. bersifat tunggal di tiap entitas, yaitu data yang hanya ada pada satu entitas saja.

Contoh: data kelembagaan untuk perumahan, kawasan permukiman, serta PSU yang hanya ada di entitas kawasan permukiman (kabupaten/kota).

2. bersifat penjumlahan data tiap entitas secara berjenjang, yaitu penjumlahan data pada entitas terkecil menjadi data pada entitas di atasnya.

Contoh: data prasarana jalan yang ada pada tiap entitas (kawasan permukiman, lingkungan hunian, maupun permukiman), di mana data pada entitas lingkungan hunian merupakan penjumlahan data pada entitas permukiman.

4.2 IDENTIFIKASI DATA MINIMAL PKP

4.2.1 Proses Identifikasi Data PKP

Analisis kebutuhan data PKP dilakukan terhadap data menurut kontennya, dengan meninjau beberapa hal, yaitu

1. peraturan
 - a. UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. PP No.14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Permenpera No.12/2014 ttg Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
2. literatur, di antaranya:
 - a. *Planning And Urban Design Standards*
 - b. *Sustaining Cities : Environmental Plannning and Management in Urban Design*
 - c. *Garden Cities 21*
 - d. *Perencanaan Tapak Untuk Perumahan*
 - e. *Time-saver Standards For Residential Development*
3. dokumen rencana terkait, meliputi:
 - a. Permen PU No.16/2009 Tentang Pedoman RTRW Kabupaten

- b. Permen PU No.17/2009 Tentang Pedoman RTRW Kota
- c. Permen PU No.20/2011 Tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi
- d. Permen PU No.19/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
- e. Permen PU No.3/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- f. Permen PU No.12/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- g. Permen PUPR No.27/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- h. Permen ESDM No.24/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenegalistrikan
- i. Pedoman Masterplan Air Limbah
- j. Pedoman Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Dari hasil tinjauan terhadap ketiga hal tersebut, maka selanjutnya kajian keterkaitan antara data dengan penyelenggaraan PKP. Jika ada kaitan secara nyata/langsung dengan penyelenggaraan PKP, maka bisa masuk ke dalam daftar panjang data PKP, sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran**

1.1

Tabel 4. 1 Contoh Kajian Keterkaitan Data dengan Penyelenggaraan PKP

KONTEN DATA	DATA PKP	KAJIAN YANG DILAKUKAN
Kependudukan – Sosial – Ekonomi	- Jumlah penduduk menurut mata pencaharian tiap kecamatan - Daya tampung penduduk per kecamatan	Kapasitas lingkungan hunian yang harus dibangun termasuk kapasitas PSU yang harus disediakan
Kawasan Permukiman	- Arah pembangunan hunian dan tempat kegiatan penduduk - Rencana pengembangan PKP Tematik per kelurahan	- Kajian fungsi dan peranan perkotaan sesuai arahan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan - Luas permukiman tematik (permukiman petani, permukiman nelayan, dan sebagainya) yang harus dikembangkan/dibangun baru/dibangun kembali
PSU	- Rencana Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran per kelurahan - Rencana Pengembangan Sistem Persampahan per kecamatan	- Jumlah truk pemadam yang harus disediakan - Jumlah TPS 3R / TPST yang harus ditingkatkan kapasitasnya

4.2.2 Kriteria Penentuan Data Minimal

Dari daftar panjang Data PKP yang dihasilkan pada subbab 4.2.1., kemudian dilakukan penyaringan data untuk tiap konten datanya, menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Data Penduduk-Sosek
 - a. Data dasar yang digunakan dalam berbagai Masterplan
 - b. Data analisis yang dihasilkan dalam analisis keruangan
 - c. Data rencana berupa arahan
2. Kriteria Data Perumahan
 - a. Data dasar terkait bangunan rumah serta pendukung untuk pembangunan rumah (kelembagaan dan pembiayaan)
 - b. Data analisis yang dihasilkan dalam analisis kebutuhan akan bangunan rumah
 - c. Data rencana berupa rencana pembangunan rumah
3. Kriteria Data Kawasan Permukiman
 - a. Data dasar terkait Kawasan Permukiman serta pendukung untuk perwujudan ruang (kelembagaan dan pembiayaan)
 - b. Data analisis yang dihasilkan dalam analisis keruangan untuk permukiman
 - c. Data rencana pengembangan kawasan permukiman dan perwujudan ruang.
4. Kriteria Data PSU
 - a. Data Dasar terkait PSU serta pendukung untuk perwujudan ruang (kelembagaan dan pembiayaan).
 - b. Data Analisis yang dihasilkan dalam analisis rencana sektoral PSU, yang :
 - 1) difokuskan pada PSU yang terkait langsung dengan pelayanan kegiatan masyarakat dalam kawasan permukiman

- 2) khusus dalam hal kelembagaan dan pembiayaan, diarahkan pada komponen prasarana dan sarana, terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- c. Data rencana pengembangan PSU.

4.2.3 Data Minimal PKP

Dengan menggunakan kriteria pada subab 4.2.2 dapat diidentifikasi data minimal. Data minimal PKP tersebut diperoleh dari sumber/rujukan data yang dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data. Secara singkat data minimal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, dan lebih lengkap dalam Lampiran 1.2

Tabel 4. 2 Daftar Singkat Data Minimal PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
KEPENDUDUKAN-SOSIAL EKONOMI				
KEPENDUDUKAN				
	Jumlah penduduk			
	1	menurut jenis kelamin	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	2	menurut usia	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	3	menurut mata pencaharian	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	4	menurut tingkat pendidikan	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	Pertumbuhan penduduk rata-rata		Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	Kepadatan penduduk		Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	Jumlah Kepala Keluarga (KK)		Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Jumlah mutasi penduduk		
a	Mutasi masuk	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka; Kecamatan Dalam Angka; Podes Data Dukcapil
b	Mutasi keluar	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka; Kecamatan Dalam Angka; Podes Data Dukcapil
TINGKAT KESEJAHTERAAN			
	Jumlah penduduk miskin	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	Jumlah rumah tangga miskin	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Angkatan kerja	Statistik Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Dukcapil
	Pendapatan Perkapita	Statistik	Kabupaten/Kota Dalam Angka
DAYA TAMPUNG			
	Daya tampung penduduk	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
	Proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
	Proyeksi kepadatan penduduk 20 tahun ke depan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
ARAH PEMBANGUNAN BIDANG SDM			
	Target pencapaian Indkes Pembangunan Manusia (IPM)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RPJPD RPJMD

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
PARTISIPASI MASYARAKAT				
	Kelompok Swadaya Masyarakat dalam peyelenggaraan PKP			
	1	Jumlah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP RP3
	2	Nama KSM	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP RP3
PERUMAHAN				
KONDISI PERUMAHAN				
	Jumlah rumah dalam permukiman			
	1	Menurut jenisnya	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	2	Menurut bentuknya	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	Jumlah bangunan gedung non hunian			
	1	Bangunan gedung pusaka	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	2	Bangunan gedung mitigasi bencana	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	Jumlah Perizinan dan pemanfaatan rumah (IMB dan SLF)			
	1	Menurut jenisnya	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	2	Menurut bentuknya	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	Jumlah status hak penghunian rumah			
	1	Hak milik	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil pendataan bangunan gedung
	2	Hak sewa	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Perumahan
	Jumlah Rumah tidak layak huni		Perumahan dan Kawasan Permukiman	E-RTLH
	Jumlah Backlog rumah			
	1	menurut pemilikan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Perumahan
	2	menurut penghunian	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Perumahan
KONDISI KELEMBAGAAN / BADANG PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN				
	Institusi pemerintah daerah dalam pembangunan rumah			
	1	Nama institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
	2	Jumlah SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
	3	Kualifikasi SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Institusi swasta dalam pembangunan rumah		
1	Nama institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
2	Jumlah SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
3	Kualifikasi SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
	Institusi pembiayaan pembangunan rumah		
1	Nama institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
2	Kemampuan pendanaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
KONDISI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN			
	Alokasi fasilitas pembiayaan pembangunan rumah 5 tahun ke belakang		
1	Alokasi pembiayaan rumah umum	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
2	Alokasi pembiayaan rumah khusus	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3
3	Alokasi pembiayaan rumah negara	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP3KP RP3

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA		ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG		
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN						
	Rencana pembangunan baru rumah					
	1	Jumlah menurut jenisnya		Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		a	rumah komersial	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		b	rumah umum	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		c	rumah swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		d	rumah khusus	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		e	rumah negara			
	2	Jumlah menurut bentuknya				
		a	rumah tunggal	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		b	rumah deret	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3
		c	rumah susun	Perumahan dan Kawasan Permukiman		RP3KP RP3

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Fasilitasi pemeliharaan/perbaikan		
1	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Perumahan dan Kawasan Permukiman	E-RTLH
2	Jumlah bangunan gedung pusaka yang dilestarikan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RTBL
PENGATURAN TERKAIT PERUMAHAN			
	Peraturan di daerah terkait kemudahan akses pembangunan rumah umum	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda
	Peraturan di daerah terkait pemanfaatan rumah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda
	Peraturan di daerah terkait Bangunan Gedung	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda
	Peraturan di daerah terkait Perzinan Mendirikan Bangunan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbup/Perwal
	Peraturan di daerah terkait Sertifikat Laik Fungsi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbup/Perwal
KAWASAN PERMUKIMAN			
Sistem wilayah			
	Luas wilayah administrasi	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
	Tutupan lahan		
1	daerah pertanian	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	2	daerah bukan pertanian	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
	3	permukiman	Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RTRW RDTR
	Sistem permukiman kabupaten			
	1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Sistem permukiman kota			
	1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Subpusat Pelayanan Kota (SPK)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	3	Lingkup Pusat Lingkungan (PL)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
KONDISI KAWASAN PERMUKIMAN				
	Permukiman perkotaan			

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	1	Luas permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	RP2KPKP RKP
	2	Luas permukiman tidak kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	Permukiman perdesaan			
	1	Luas permukiman perdesaan prioritas	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Luas permukiman perdesaan non prioritas	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	Permukiman khusus			
	1	Luas permukiman perbatasan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Luas permukiman di pulau kecil terluar	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	3	Luas permukiman pariwisata prioritas	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	4	Luas permukiman rawan bencana	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
IDENTITAS LAHAN/TANAH				
	Harga lahan		Pertanahan	Peta Zona Nilai Tanah

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Status penguasaan tanah		
1	Luas tanah negara	Pertanahan	Buku Tanah
2	Luas tanah perorangan	Pertanahan	Buku Tanah
	Hak atas tanah perorangan		
1	Luas tanah Hak Milik	Pertanahan	Buku Tanah
2	Luas tanah Hak Guna Bangunan (HGB)	Pertanahan	Buku Tanah
3	Luas tanah Hak Guna Usaha (HGU)	Pertanahan	Buku Tanah
4	Luas tanah Hak Pakai	Pertanahan	Buku Tanah
5	Luas tanah Hak Sewa	Pertanahan	Buku Tanah
KONDISI KELEMBAGAAN/BADAN PEMBANGUNAN			
	Institusi pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan permukiman		
1	Nama institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
2	Jumlah SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
3	Kualifikasi SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	Institusi swasta dalam pembangunan kawasan permukiman		
1	Nama institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	2	Jumlah SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	3	Kualifikasi SDM dalam institusi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
KONDISI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan kawasan permukiman 5 tahun ke belakang			
	1	Alokasi pembiayaan permukiman perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Alokasi pembiayaan permukiman perdesaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	3	Alokasi pembiayaan permukiman khusus	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Rencana peruntukan ruang skala kabupaten/kota			
	1	Luas peruntukan ruang permukiman perkotaan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Luas peruntukan ruang permukiman perdesaan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	3	Luas peruntukan ruang perumahan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	4	Luas peruntukan ruang perdagangan dan jasa	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	5	Luas peruntukan ruang perkantoran/pemerintahan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Rencana peruntukan ruang skala detail			
	1	Luas zona perumahan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	2	Luas zona perdagangan dan jasa	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	3	Luas zona perkantoran	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	4	Luas zona sarana pelayanan umum	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	5	Luas zona peruntukan khusus	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	6	Luas zona peruntukan campuran	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	Rencana pembangunan permukiman perkotaan			
	1	Luas pengembangan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Luas pembangunan baru	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	3	Luas pembangunan Kembali	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	Rencana pembangunan permukiman perdesaan			
	1	Luas pengembangan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Luas pembangunan baru	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	3	Luas pembangunan Kembali	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	Rencana pembangunan permukiman khusus			
	1	Luas pengembangan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	2	Luas pembangunan baru	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
	3	Luas pembangunan Kembali	Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPPIP/RP3KP RKP
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk permukiman perkotaan			
	1	Ketentuan umum kegiatan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Ketentuan umum intensitas bangunan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk permukiman perdesaan			
	1	Ketentuan umum kegiatan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Ketentuan umum intensitas bangunan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perumahan			

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	1	Ketentuan umum kegiatan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Ketentuan umum intensitas bangunan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa			
	1	Ketentuan umum kegiatan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Ketentuan umum intensitas bangunan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perkantoran/pemerintahan			
	1	Ketentuan umum kegiatan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	2	Ketentuan umum intensitas bangunan	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RTRW
	Peraturan zonasi untuk zona perumahan			
	1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Peraturan zonasi untuk zona perdagangan dan jasa		
1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	Peraturan zonasi untuk zona perkantoran		
1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	Peraturan zonasi untuk zona sarana pelayanan umum		
1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	Peraturan zonasi untuk zona peruntukan khusus			
	1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	Peraturan zonasi untuk zona peruntukan campuran			
	1	Kegiatan & penggunaan lahan yang diizinkan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	2	Kegiatan & penggunaan lahan bersyarat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	3	Kegiatan & penggunaan lahan terbatas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	4	KDB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	5	KLB maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	6	Tinggi maks	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
	7	KDH min	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RDTR
PENGATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN				

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Peraturan di daerah terkait penanganan kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda
	Peraturan di daerah terkait RP2KPKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbup/Perwal
	Peraturan di daerah terkait RKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbup/Perwal
	Peraturan di daerah terkait RP3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbup/Perwal
PRASARANA SARANA UTILITAS			
KONDISI PRASARANA			
	Prasarana Transportasi		
1	Transportasi Darat		
a	Jumlah terminal penumpang tipe C	Perhubungan	Tatralok
b	Jumlah halte	Perhubungan	Tatralok
c	Panjang trayek angkutan umum	Perhubungan	Tatralok
2	Transportasi Udara		
a	Jumlah bandara perintis	Perhubungan	Tatralok
3	Transportasi Laut		
a	Jumlah pelabuhan perintis	Perhubungan	Tatralok
	Prasarana jalan		
1	Berdasarkan fungsi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
2	Berdasarkan kelas	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	3	Berdasarkan status	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	Prasarana sistem penyediaan air minum			
	1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sistem Penyediaan Air Minumnya		
	a	Jaringan Perpipaan (PAM/PDAM/Perdesaan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	b	Sumur Dangkal	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	c	Sumur Pompa	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	d	Bak Penampungan Air Hujan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	e	Terminal Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	f	Bangunan Penangkap Mata Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	2	Sistem Jaringan Perpipaan (PAM/PDAM, Perdesaan)		
	a	Data Agregat SPAM Perpipaan PAM/PDAM	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	b	Data Agregat SPAM Perpipaan Perdesaan		
	c	Data Agregat Sistem Perpipaan Distribusi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	d	Unit SPAM perpipaan PAM/PDAM (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan masuk ke data kecamatan, jika melayani beberapa kecamatan maka masuk ke	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
		data kabupaten/kota)		
	e	Unit SPAM perpipaan perdesaan (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	3	Sistem Bukan Jaringan Perpipaan		
	a	Data Agregat Sumur Dangkal	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	b	Data Agregat Sumur Pompa	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	c	Data Agregat Bak Penampungan Air Hujan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	d	Data Agregat Terminal Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	e	Data Agregat Bangunan Penangkap Mata Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	f	Unit Sumur Dangkal (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	g	Unit Sumur Pompa (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	d	Unit Bak Penampungan Air Hujan (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	h	Unit Terminal Air (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	i	Unit Bangunan Penangkap Mata Air (Pendataan dilakukan pada tiap unit SPAM, jika SPAM melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Prasarana jaringan drainase			
	1	Kondisi Hidrologis		
		a	Data agregat hidrologis	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang RIS Drainase
		b	Data Banjir Rencana (Pendataan dilakukan pada tiap sungai/saluran, jika sungai/saluran hanya berada di satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melewati beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika melewati beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang RIS Drainase
		c	Data Genangan (Pendataan dilakukan pada tiap lokasi genangan, jika genangan hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang RIS Drainase

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	d	Data Pasang Surut (Pendataan dilakukan pada tiap lokasi, jika lokasi hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	2	Kondisi saluran		
	a	Saluran Primer	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	b	Panjang saluran sekunder	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	c	Panjang saluran tersier	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	3	Kondisi Kolam dan Pintu Air		
	a	Data Agregat Kolam Retensi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	b	Data Agregat Kolam Tandon	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	c	Data Agregat Kolam Detensi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	d	Data Agregat Pintu Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	e	Unit kolam retensi (Pendataan dilakukan pada tiap kolam jika kolam hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
			data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)		
		f	Unit kolam tandon (Pendataan dilakukan pada tiap kolam jika kolam hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		g	Unit kolam tendensi (Pendataan dilakukan pada tiap kolam jika kolam hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		h	Unit pintu air (Pendataan dilakukan pada tiap lokasi pintu air)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	Prasarana sistem pengelolaan air limbah				
	1	Data Agregat Pelayanan Pengelolaan Air Limbah			

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	a	Buangan Air Limbah		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	b	Tingkat pelayanan IPAL		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	c	Tingkat penggunaan tangki septik		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	2	Data Agregat Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat			
	a	Jumlah Tangki Septik		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	b	Jumlah MCK		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	3	Data Agregat Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat			
	a	IPAL		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	b	Sistem Perpipaan		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	c	IPLT		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	2	Pengolahan Air Limbah			
	a	Unit IPAL (Pendataan dilakukan pada tiap IPAL, jika IPAL hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika mencakup beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	b	Unit Mandi Cuci Kakus (MCK) (Pendataan dilakukan pada tiap MCK, jika MCK hanya mencakup satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika mencakup beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	c	Unit IPLT (Pendataan dilakukan pada tiap IPLT, jika IPLT melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan, jika melayani beberapa kecamatan maka masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	Prasarana sistem pengelolaan persampahan			
	1	Data Agregat Pelayanan Sampah		
	a	Jumlah timbulan sampah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	b	Kapasitas sampah yang masuk ke TPS 3R	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	2	Data Agregat Pengangkutan		
	a	Tingkat keterangkutan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	b	Jumlah angkutan sampah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	3	Data Agregat Pengolahan Sampah		
	a	TPS 3R	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	b	TPST	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
		c	SPA	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
		d	Jumlah TPA	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	2	Pengolahan Sampah			
		a	Unit TPS 3R (Pendataan dilakukan pada tiap TPS 3R, jika TPS 3R hanya melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
		b	Unit TPST (Pendataan dilakukan pada tiap TPST, jika TPST hanya melayani satu desa/kelurahan maka masuk ke data desa/kelurahan, jika melayani beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka masuk ke data kecamatan)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
		c	Unit SPA (Pendataan dilakukan pada tiap SPA yang melayani beberapa kecamatan sehingga masuk ke data kabupaten/kota)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
		d	Unit TPA	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana sistem proteksi kebakaran				
	1	Jumlah pos pemadam kebakaran		Penanggulangan Kebencanaan / Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	2	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran			

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	3	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Penanggulangan Kebencanaan / Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
KONDISI SARANA				
	Sarana pendidikan		Statistik Pendidikan	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Pokok Pendidikan
	Sarana kesehatan		Statistik Kesehatan	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Buku Profil Kesehatan
	Sarana perdagangan dan jasa		Statistik Perdagangan	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Pokok Perdagangan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Sarana peribadatan	Statistik Agama	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data Pokok Sarana Agama
	Sarana olahraga dan ruang terbuka	Statistik Lingkungan Hidup	Kabupaten/Kota Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka Podes Data SLHD
KONDISI UTILITAS			
	Jaringan listrik		
1	Pelayanan listrik	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
2	Gardu	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
3	Jaringan transmisi	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	Jaringan telekomunikasi		
1	Pelayanan telekomunikasi	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan Telekomunikasi
2	Jaringan Kabel	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
				Telekomunikasi
	3	Jaringan Nirkabel	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan Telekomunikasi
		Jaringan gas rumah tangga		
	1	Pelayanan gas rumah tangga	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas
	2	Jumlah stasiun gas	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas
	3	Jaringan distribusi	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas
KONDISI KELEMBAGAAN/BADAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN UTILITAS				
		Prasarana Transportasi		
	1	Institusi pemerintah daerah	Perhubungan	Tatralok
	2	Institusi swasta	Perhubungan	Tatralok
		Prasarana Jalan		
	1	Institusi pemerintah daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	2	Institusi swasta	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
		Prasarana Air Minum		
	1	Institusi pemerintah daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	2	Institusi swasta	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		Prasarana Jaringan Drainase		
	1	Institusi pemerintah daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	2	Institusi swasta	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	Prasarana sistem pengelolaan air limbah			
	1	Institusi pemerintah daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	2	Institusi swasta	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	Prasarana sistem pengelolaan persampahan			
	1	Institusi pemerintah daerah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	2	Institusi swasta	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana sistem proteksi kebakaran			
	1	Institusi pemerintah daerah	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	2	Institusi swasta	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	Sarana Pendidikan			
	1	Institusi pemerintah daerah	Pendidikan	Data Pokok Pendidikan
	2	Institusi swasta	Pendidikan	Data Pokok Pendidikan
	Sarana kesehatan			
	1	Institusi pemerintah daerah	Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
	2	Institusi swasta	Kesehatan	Buku Profil Kesehatan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Sarana Perdagangan dan Jasa			
1	Institusi pemerintah daerah		Perdagangan	Data Pokok Perdagangan
2	Institusi swasta		Perdagangan	Data Pokok Perdagangan
	Sarana Peribadatan			
1	Institusi pemerintah daerah		Agama	Data Pokok Keagamaan
2	Institusi swasta		Agama	Data Pokok Keagamaan
	Sarana olahraga dan ruang terbuka			
1	Institusi pemerintah daerah		Lingkungan Hidup	Data SLHD
2	Institusi swasta		Lingkungan Hidup	Data SLHD
KONDISI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
	Prasarana Transportasi			
1	Alokasi pembiayaan pembangunan transportasi darat 5 tahun ke belakang		Perhubungan	Tatralok
2	Alokasi pembiayaan pembangunan transportasi laut 5 tahun ke belakang		Perhubungan	Tatralok
3	Alokasi pembiayaan pembangunan transportasi udara 5 tahun ke belakang		Perhubungan	Tatralok
	Prasarana Jalan			
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan jalan 5 tahun ke belakang		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Prasarana Air Minum		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan SPAM perpipaan skala kota 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan SPAM perpipaan perdesaan 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
3	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan SPAM bukan perpipaan 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana Jaringan Drainase		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan saluran drainase 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan kolam dan pintu air 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana sistem pengelolaan air limbah		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan SPAL terpusat 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan SPAL setempat 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana sistem pengelolaan persampahan		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pengangkutan sampah 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pengolahan sampah 5 tahun ke belakang	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	Prasarana sistem proteksi kebakaran		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan pos pemadam kebakaran 5 tahun ke belakang	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pengadaan angkutan pemadam 5 tahun ke belakang	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
3	Alokasi fasilitasi pembiayaan pengadaan APAR 5 tahun ke belakang	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	Sarana		
1	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan sarana pendidikan 5 tahun ke belakang	Pendidikan	Renstra Pendidikan
2	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan sarana kesehatan 5 tahun ke belakang	Kesehatan	Renstra Kesehatan
3	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan sarana perdagangan dan jasa 5 tahun ke belakang	Perdagangan	Renstra Perdagangan
4	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan sarana peribadatan 5 tahun ke belakang	Agama	Renstra Keagamaan
5	Alokasi fasilitasi pembiayaan pembangunan olahraga dan ruang terbuka 5 tahun ke belakang	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
RENCANA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN UTILITAS			
	Prasarana Transportasi		
1	Pengembangan Transportasi Darat		

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
		a	Pembangunan terminal penumpang tipe C	Perhubungan	Tatralok
		b	Pembangunan halte	Perhubungan	Tatralok
		c	Pengembangan jalur angkutan umum	Perhubungan	Tatralok
	2	Pengembangan Transportasi Udara			
		a	Pembangunan bandara perintis	Perhubungan	Tatralok
	3	Pengembangan Transportasi Laut			
		a	Pembangunan pelabuhan perintis	Perhubungan	Tatralok
	Prasarana jalan				
	1	Menurut fungsi		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	2	Menurut kelas		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	3	Menurut status		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	Prasarana sistem penyediaan air minum				
	1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan			
		a	Pembangunan baru unit SPAM perpipaan PAM/PDAM	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		b	Pembangunan baru unit SPAM Perdesaan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		c	Peningkatan unit SPAM perpipaan PAM/PDAM	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		d	Peningkatan unit SPAM perpipaan Perdesaan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		e	Pembangunan jaringan perpipaan baru	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
		f	Peningkatan jaringan perpipaan eksisting	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	4	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			
		a	Sumur dangkal	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		b	Sumur Pompa	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		c	Bak Penampungan Air Hujan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		d	Terminal Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
		e	Bangunan Penangkap Mata Air	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	Prasarana jaringan drainase				
	1	Pengurangan genangan		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	2	Pembangunan dan peningkatan saluran			
		a	Saluran primer	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		b	Saluran sekunder	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		c	Saluran tersier	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	3	Kolam retensi			
		a	Pembangunan baru unit kolam retensi	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		b	Volume unit kolam retensi baru	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		c	Peningkatan volume kolam retensi eksisting	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	4	Kolam tandon			
		a	Pembangunan baru unit kolam tandon	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
		b	Volume unit kolam tandon baru	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA				SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN			ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	c	Peningkatan volume kolam tandon eksisting		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	5	Kolam detensi			
	a	Pembangunan baru unit kolam detensi		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	b	Volume unit kolam detensi baru		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	c	Peningkatan volume kolam detensi eksisting		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	6	Pintu air			
	a	Pembangunan baru unit pintu air		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	b	Penyediaan genset baru		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	c	Penyediaan pompa baru		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	Prasarana sistem pengelolaan air limbah				
	1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat			
	a	Fasilitas pengadaan unit tangki septik		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	b	Fasilitas pengadaan MCK		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat			
	a	IPAL		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	c	Sistem Perpipaan		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	d	IPLT		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	Prasarana sistem pengelolaan persampahan				
	1	Peningkatan kapasitas pengangkutan sampah		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	2	TPS 3R		Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	3	TPST	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	4	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	5	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Prasarana sistem proteksi kebakaran			
	1	Pembangunan pos pemadam kebakaran	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	2	Peningkatan kendaraan pemadam kebakaran	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	3	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	Sarana pendidikan			
	1	Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK)	Pendidikan	Renstra Pendidikan
	2	Pembangunan Sekolah Dasar (SD)	Pendidikan	Renstra Pendidikan
	3	Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pendidikan	Renstra Pendidikan
	4	Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pendidikan	Renstra Pendidikan
	5	Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)	Pendidikan	Renstra Pendidikan
	Sarana kesehatan			

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	1	Pembangunan Pos pelayanan terpadu (Posyandu)	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	2	Pembangunan Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Pembantu	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	3	Pembangunan Klinik kesehatan	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	4	Pembangunan Apotek/rumah obat	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	5	Pembangunan Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	6	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kesehatan	Renstra Kesehatan
	Sarana perdagangan dan jasa			
	1	Pembangunan Toko/warung	Perdagangan	Renstra Perdagangan
	2	Pembangunan Pertokoan	Perdagangan	Renstra Perdagangan
	3	Pembangunan Pusat pertokoan atau pasar lingkungan	Perdagangan	Renstra Perdagangan
	4	Pembangunan Pusat perbelanjaan dan niaga	Perdagangan	Renstra Perdagangan
	Sarana peribadatan			
	1	Pembangunan Masjid	Agama	Renstra Keagamaan
	2	Pembangunan Gereja	Agama	Renstra

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
				Keagamaan
	3	Pembangunan Wihara	Agama	Renstra Keagamaan
	4	Pembangunan Pura	Agama	Renstra Keagamaan
	5	Pembangunan Klenteng	Agama	Renstra Keagamaan
	Sarana olahraga dan ruang terbuka			
	1	Pembangunan Taman RT	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
	2	Pembangunan Taman lingkungan	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
	3	Pembangunan Jalur Hijau	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
	4	Pembangunan Kuburan/Tempat Pemakaman Umum	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
	5	Pembangunan Taman dan lapangan olahraga	Lingkungan Hidup	Renstra Lingkungan Hidup
	Jaringan listrik			
	1	Gardu		
	a	Pembangunan Gardu Distribusi (GD)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	b	Pembangunan Gardu Induk (GI)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA			SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN		ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
	2	Jaringan transmisi		
	a	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	b	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	c	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	d	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	e	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	f	Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	Jaringan telekomunikasi			
	1	Jaringan Kabel	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan Telekomunikasi
	2	Jaringan Nirkabel	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan Telekomunikasi
	Jaringan gas rumah tangga			
	1	Stasiun gas	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas
	2	Jaringan distribusi	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYEDIAAN BASIS DATA PKP

KONTEN DATA / DATA		SUMBER DATA	ALTERNATIF RUJUKAN DOKUMEN
ITEM	PENDETAILAN	ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB BIDANG	
PENGATURAN TERKAIT PSU			
	Pengaturan di daerah terkait prasarana transportasi	Perhubungan	Tatralok
	Pengaturan di daerah terkait prasarana jalan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Jalan
	Pengaturan di daerah terkait prasarana sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Minum
	Pengaturan di daerah terkait prasarana drainase	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Drainase
	Pengaturan di daerah terkait prasarana sistem pengelolaan air limbah	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Air Limbah
	Pengaturan di daerah terkait prasarana sistem pengelolaan persampahan	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	RIS Persampahan
	Pengaturan di daerah terkait prasarana sistem proteksi kebakaran	Penanggulangan Kebencanaan/Kebakaran	RIS Proteksi Kebakaran
	Pengaturan di daerah terkait jaringan listrik	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Listrik
	Pengaturan di daerah terkait jaringan telekomunikasi	Komunikasi dan Informatika	RIS Jaringan Telekomunikasi
	Pengaturan di daerah terkait jaringan gas rumah tangga	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	RIS Jaringan Gas

Berdasarkan data minimal PKP sebagaimana diuraikan secara jelas dalam Lampiran 1.2, selanjutnya telah dirumuskan Form Isian data PKP yang dapat digunakan oleh Produsen Data. Adapun Form Isian data PKP dikelompokkan menurut tiap entitas datanya, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.1 sampai dengan 2.3

4.3 TATA CARA PEROLEHAN DATA MINIMAL PKP

Sebagaimana diuraikan dalam Subbab 4.2, bahwa Produsen Data dapat menggunakan Form Isian data PKP yang sudah dirumuskan, atau melakukan pengembangan lebih lanjut. Form Isian data PKP dapat diisi dengan menggunakan data yang diperoleh melalui:

1. pengumpulan data tidak langsung merujuk pada dokumen sektoral yang sudah dihasilkan oleh produsen data, dengan ketentuan:
 - a. data dasar dan analisis harus menggunakan dokumen terbaru pada tahun pengumpulan data;
 - b. data rencana menggunakan dokumen yang sesuai ketentuan peraturan terkait dokumen, dengan umur dokumen tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan jika dokumen yang dirujuk sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka harus dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan terkait yang berlaku;
 - c. data yang bersifat ukuran luas dan panjang diarahkan menggunakan data geospasial/harus terpetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau minimal 1 : 50.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk kota;
 - d. dalam hal data pada poin c belum tersedia, maka dilakukan pengumpulan data langsung di lapangan.
2. pengumpulan data langsung oleh produsen data dengan supervisi dari Pembina Data terkait, dengan ketentuan:
 - a. data dasar dan analisis yang tidak berupa ukuran luas dan panjang (non spasial), dikumpulkan langsung oleh produsen data sesuai

dengan entitas datanya, melalui survei/sensus/cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. data dasar dan analisis yang berupa ukuran luas dan panjang (bersifat spasial), dikumpulkan langsung oleh produsen data sesuai dengan entitas datanya, melalui survei (*plotting* dan *tracking*) menggunakan peta dengan skala 1 : 5.000 atau minimal 1 : 50.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk kota

Rujukan dokumen baik untuk data dasar, analisis, maupun data rencana, dapat dilihat pada tabel 4.2. Dalam hal terdapat beberapa alternatif dokumen yang dapat dirujuk, maka perlu diputuskan di dalam Forum Data, dokumen mana yang akan dijadikan rujukan oleh Produsen Data.

Adapun terkait dengan peta yang dijadikan rujukan dalam data geospasial dan pengumpulan data langsung di lapangan belum tersedia, maka produsen data penataan ruang dengan supervisi dari Pembina Data Geospasial, dapat menyediakan peta sesuai dengan skala yang dibutuhkan, yaitu :

1. skala 1 : 5.000
2. minimal 1 : 50.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk kota

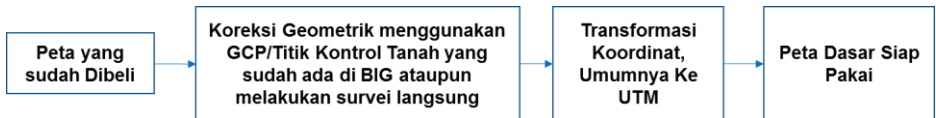
Proses pemetaan dimulai dengan pembelian peta analog sesuai dengan skala yang dibutuhkan, atau peta citra dalam format digital dengan resolusi yang dapat mendukung skala peta yang dibutuhkan. Resolusi peta citra yang dibutuhkan untuk skala peta yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Keselarasan Resolusi Peta Citra dengan Skala Peta yang Direkomendasikan

Skala Peta	Terdeteksi dalam meter	Resolusi Citra (meter)	Citra satelit yang sepadan dan resolusinya dalam (meter)
1:5000	5	2,5	QuickBird (2,4&2,8)
			SPOT 5 (2,5-5)
			Formosat 2 (2)
			ALOS (2,5)
1:25.000	25	12,5	SPOT 5 (10)

Skala Peta	Terdeteksi dalam meter	Resolusi Citra (meter)	Citra satelit yang sepadan dan resolusinya dalam (meter)
1:50.000	50	25	Landsat TM (15)
			ALOS (10)
			Aster VNIR(15)
			Landsat TM (30)
			Aster SWIR (30)

Selanjutnya dari peta citra yang ada dilakukan proses koreksi geometric dan transformasi koordinat.



Gambar 4. 2 Proses Penyiapan Peta Dasar

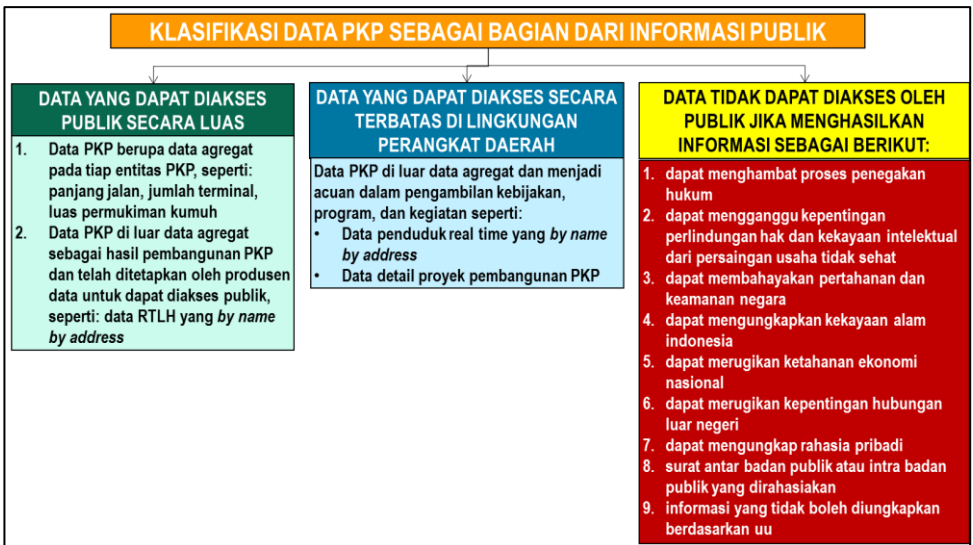
Peta dasar yang siap dipakai, selanjutnya dapat disebarluaskan oleh Wali Data ke semua produsen data yang membutuhkan peta dasar tersebut.

4.4 DATA MINIMAL PKP DALAM KAITANNYA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI

Data minmal PKP awal yang telah dirumuskan, pada dasarnya merupakan data publik yang dapat diakses oleh seluruh pengguna data. Namun dalam perkembangannya, sangat dimungkinkan adanya perkembangan data, baik dari segi jumlah maupun kualitas data. Dengan demikian sangat mungkin data yang berkembang tersebut memiliki kerahasiaan tertentu/tidak dapat diakses publik/dapat diakses secara terbatas.

Dalam konteks keterbukaan informasi, Penyedia Basis Data Minimal PKP, melalui Forum Data selanjutnya dapat menetapkan data-data mana saja

yang dapat diakses publik (masyarakat umum), dan mana data yang hanya dapat diakses antar lintas Perangkat Daerah. Untuk menetapkan pun perlu dilakukan pengujian konsekuensi apakah suatu data dapat dikecualikan atau dapat diakses terbatas. Dengan mengacu pada karakter data PKP dan amanat dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat diuraikan beberapa kriteria data PKP menurut tingkat keterbukaannya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 3 Kriteria Data Menurut Tingkat Keterbukaannya

BAB V TATA CARA PENGEMBANGAN DATA MINIMAL PKP

5.1 UMUM

Data minimal PKP sesuai dengan hasil kajian, baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maupun kajian literatur terkait, serta telah disesuaikan dengan kriteria penentuan data minimal, telah dijelaskan dan diuraikan pada subbab 4.2 dan pada Lampiran 1.2. Data minimal PKP tersebut adalah arahan dari Pusat, dalam hal ini dari Kementerian PUPR.

Sesuai kewenangannya, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkannya. Pengembangan yang dimaksud adalah memperbaharui struktur data minimal PKP sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah, serta memperbaharui data itu sendiri.

5.2 TATA CARA PEMBAHARUAN STRUKTUR DATA MINIMAL PKP

Pembaharuan struktur data dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Pembaharuan struktur data baru karena adanya kebutuhan yang dimaksud, terjadi karena:

1. adanya rujukan baru terkait data sektoral seperti :
 - a. data rencana yang tertuang dalam Rencana Kawasan Permukiman (RKP)
 - b. data rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3)

- 1) adanya kebutuhan untuk memperluas lingkup data minimal yang perlu dibagikan kepada pengguna data, seperti:
 - c. data potensi dan permasalahan dalam pengembangan PSU
 - d. data program pembangunan PSU

Pembaharuan struktur data baru sesuai kapasitas daerah yang dimaksud adalah :

1. Adanya penambahan kapasitas perangkat daerah, dalam pengolahan data dasar menjadi suatu data analisis tertentu yang perlu dibagikan kepada pengguna data.
Contoh : penambahan kapasitas perangkat daerah dalam menganalisis pasar perumahan, sehingga perlu memasukkan data pangsa pasar perumahan ke dalam struktur data
2. Adanya penambahan kapasitas daerah dalam hal pengelolaan konten data yang lebih luas.
Contoh : pengelolaan konten data untuk wilayah metropolitan, yang lintas kabupaten/kota, dan ada perangkat daerah tertentu yang diberi kewenangan dalam hal pengelolaan data lintas wilayah tersebut

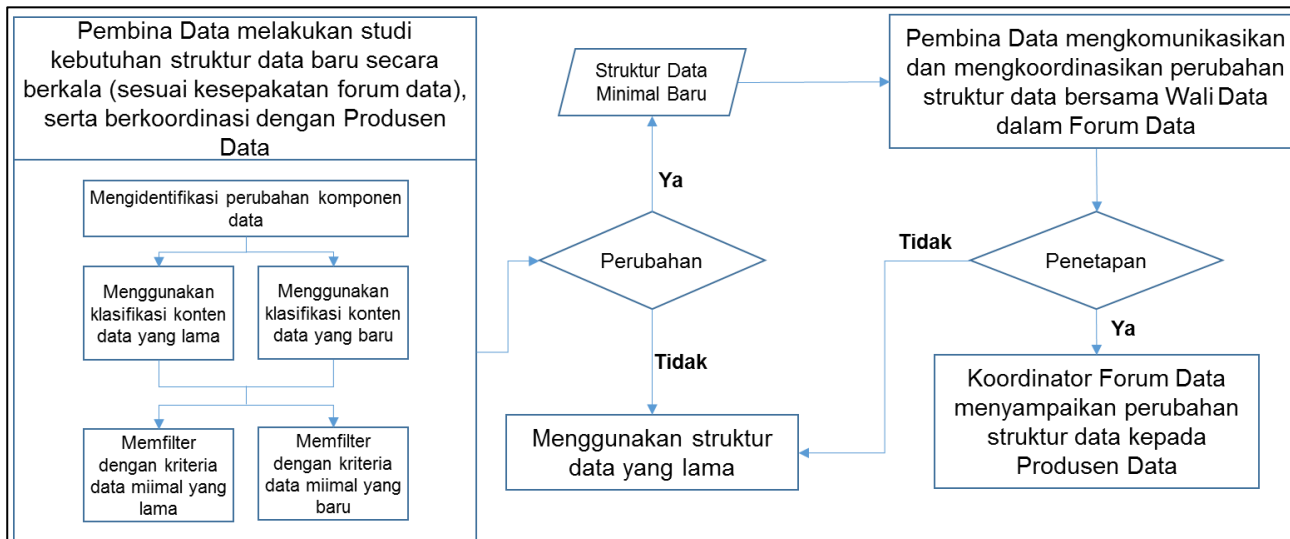
Pembaharuan struktur data minimal PKP melibatkan Pembina Data, Forum Data, Koordinator Forum Data, serta Produsen Data. Tahapan dari perubahan struktur data minimal PKP adalah sebagai berikut:

1. Pembina Data melakukan studi kebutuhan struktur data baru secara berkala, sesuai rencana aksi tahunan pengelolaan basis data yang telah disepakati dalam Forum Data. Dalam melakukan studi tersebut, Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data.
Studi dilakukan karena adanya kebutuhan dan penambahan kapasitas daerah. Dalam studi tersebut, Pembina Data dapat menggunakan pengelompokan konten data yang lama (sesuai arahan pusat), ataupun menggunakan konten data yang baru.
Selanjutnya Pembina Data melakukan kajian terhadap kriteria penentuan data minimal untuk tiap konten data. Apakah menggunakan

kriteria lama (sesuai arahan pusat) ataupun menggunakan kriteria baru sesuai dengan kesepakatan masing-masing Pembina Data.

2. Pembina Data selanjutnya mengidentifikasi apakah ada perubahan struktur data minimal, sesuai dengan hasil studi. Jika ada kesepakatan untuk merubah struktur data minimal, maka kesepakatan di masing-masing Pembina Data dibawa dalam Forum Data untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Wali Data. Dengan memperhatikan kebutuhan data dari perangkat daerah terkait dan masyarakat, serta standar data dan metadata yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan Produsen Data, maka Forum Data dapat memutuskan apakah kesepakatan struktur data minimal PKP yang baru, dapat ditetapkan atau tidak.
3. Jika struktur data minimal PKP yang baru telah ditetapkan, maka Koordinator Forum Data menyampaikan perubahan struktur data kepada Produsen Data. Jika tidak ditetapkan, maka kembali pada struktur data minimal PKP yang lama.

Secara skematis, tata cara pembaharuan struktur data minimal PKP dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5. 1 Tat Cara Pembaharuan Struktur Data Minimal PKP

5.3 TATA CARA PEMBAHARUAN DATA MINIMAL PKP

5.3.1 Umum

Mengingat data statistik, data geospasial, dan data tematik lainnya dapat berubah seiring waktu, baik bertambah atau berkurang, maka diperlukan pembaharuan data minimal PKP. Identifikasi kebutuhan pembaharuan data dilakukan oleh Produsen Data dengan mereview data lama, dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan basis data yang disepakati dalam Forum Data.

Kebutuhan pembaharuan data untuk tiap tipe data adalah sebagai berikut:

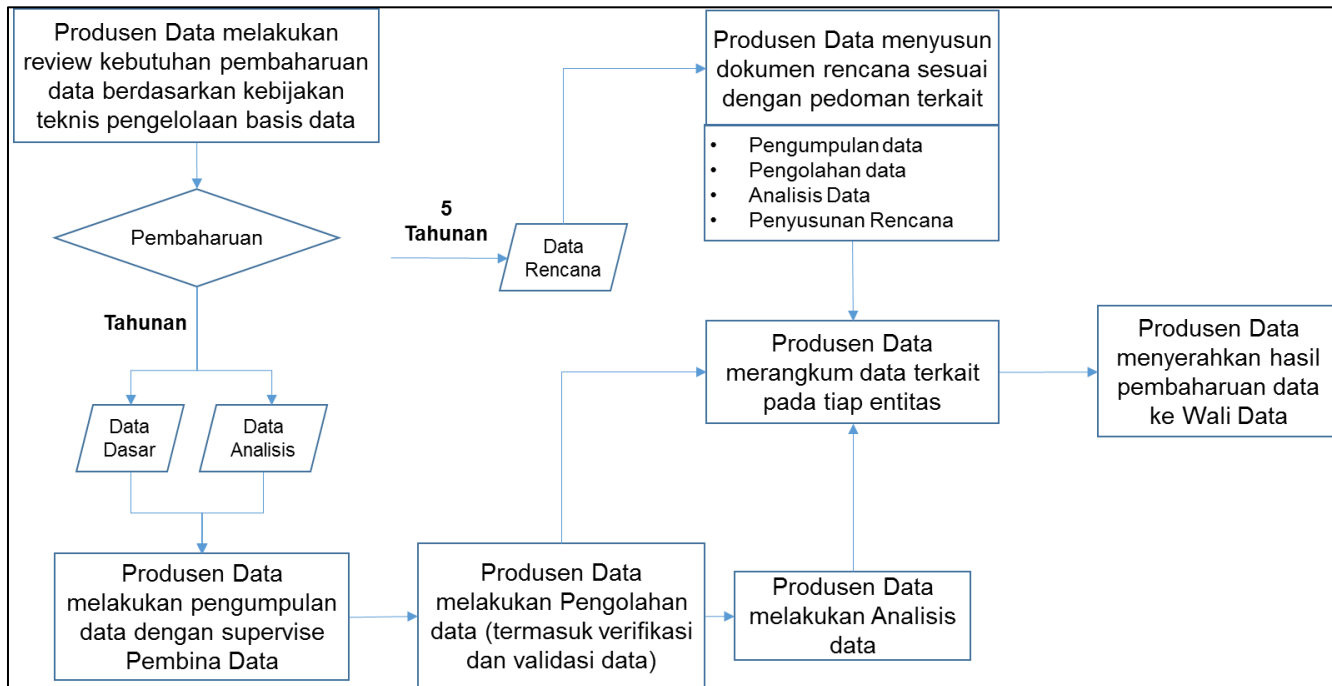
1. Pembaharuan data dasar dan data analisis, yang bersifat kondisi eksisting dilakukan tiap tahun
2. Pembaharuan data rencana dilakukan minimal 1 x dalam 5 tahun

Pembaharuan data dilakukan dengan cara:

1. Data dasar dan data analisis, melalui pengumpulan data yang dilakukan dari tingkat kelurahan/desa hingga kecamatan, dengan supervise dari Pembina Data, seperti:
 - a. sensus, survei, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. pengumpulan tidak langsung, dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain
2. Data rencana yang dilakukan dengan mengacu pada pedoman penyusunan rencana sektoral. Adapun tahapan standar yang dilakukan dalam penyusunan rencana adalah: 1) pengumpulan data; 2) pengolahan data; 3) analisis data; dan 4) penyusunan rencana.

Data terbaru yang diperoleh, dirangkum untuk tiap entitasnya. Hasil dari pembaharuan data diserahkan oleh Produsen Data kepada Wali Data.

Secara umum, tata cara pembaharuan data minimal PKP dapat dilihat pada gambar berikut ini.



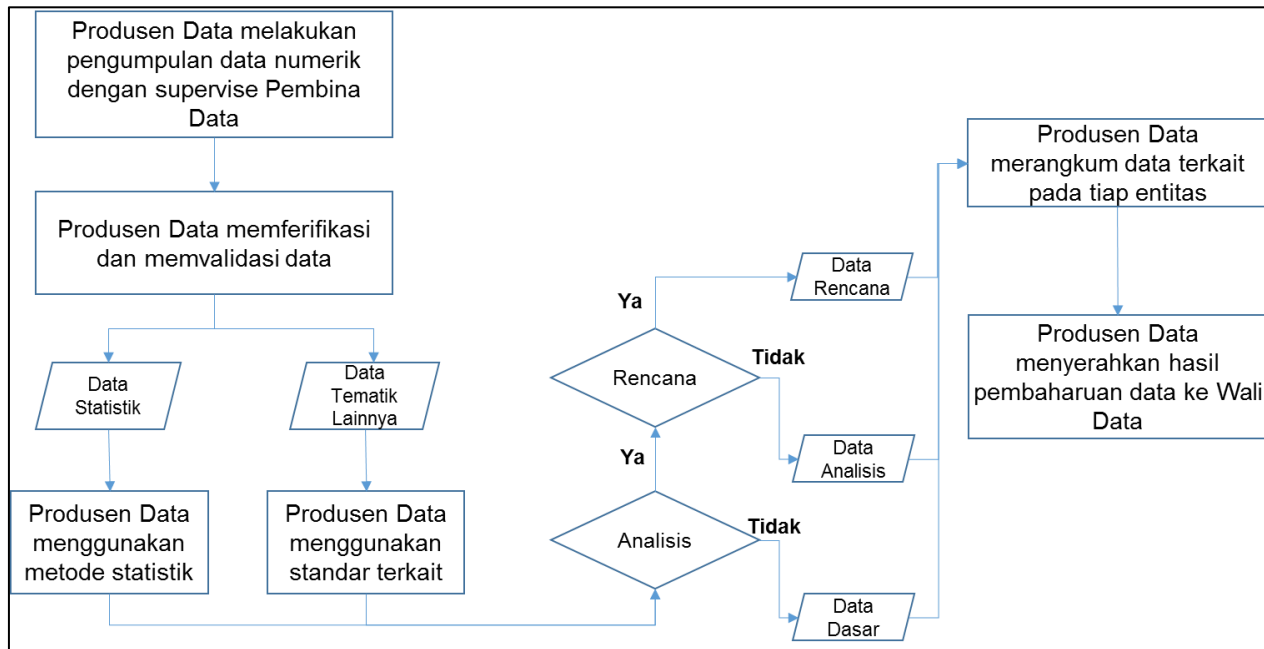
Gambar 5. 2 Tata Cara Pembaharuan Data Minimal PKP Secara Umum

5.3.2 Pembaharuan Data Statistik dan Tematik Lainnya

Secara lebih spesifik, pembaharuan data statistik dan tematik lainnya yang dilakukan setelah melakukan review kebutuhan pembaharuan data adalah sebagai berikut :

1. Produsen Data melakukan pengumpulan data numerik dengan supervise dari Pembina Data
2. Produsen Data memferifikasi dan memvalidasi data:
 - a. untuk data stistik verifikasi menggunakan metode statistik yang diverifikasi oleh Pembina Data Statistik
 - b. untuk data tematik lainnya menggunakan standar data terkait yang dikeluarkan oleh Pembina Data PKP
3. Data kemudian dikelompokkan menurut tipenya untuk tiap konten datanya
4. Produsen Data merangkum data terkait pada tiap entitas
5. Hasil dari pembaharuan data diserahkan oleh Produsen Data kepada Wali Data

Secara umum, tata cara pembaharuan data statistik dan tematik lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



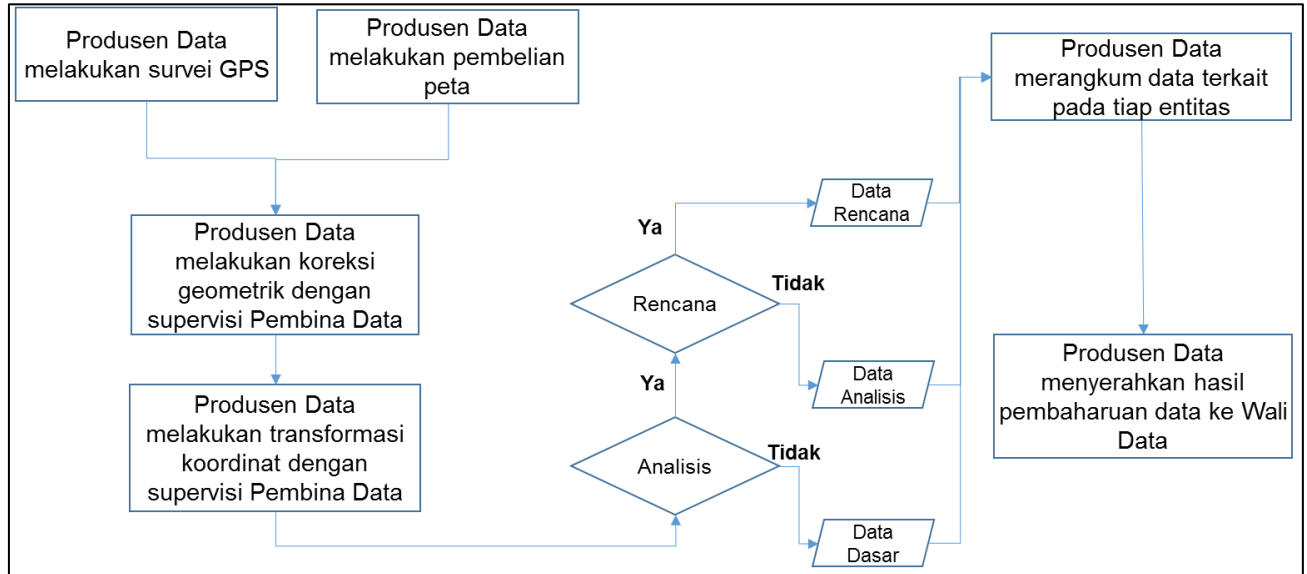
Gambar 5. 3 Tata Cara Pembaharuan Data Statistik dan Tematik Lainnya

5.3.3 Pembaharuan Data Geospasial

Secara lebih spesifik, pembaharuan data geospasial yang dilakukan setelah melakukan review kebutuhan pembaharuan data adalah sebagai berikut :

1. Produsen Data melakukan pengumpulan data geospasial:
 - a. melakukan survei GPS, meliputi : 1) tracking/marketing menggunakan GPS; 2) dokumentasi foto lokasi survei; 3) sinkronisasi data survei dan foto
 - b. pembelian peta citra sesuai dengan skala rencana
2. Produsen Data melakukan koreksi geometrik dengan supervisi Pembina Data untuk mengurangi distorsi geometrik citra satelit, dengan membandingkan titik pada peta dengan titik pada lokasi di lapangan. Adapun titik acuannya adalah titik Ground Control Point (GCP)
3. Produsen Data melakukan transformasi koordinat dengan supervisi Pembina Data, ke sistem koordinat UTM.
4. Data kemudian dikelompokkan menurut tipenya untuk tiap konten datanya
5. Produsen Data merangkum data terkait pada tiap entitas
6. Hasil dari pembaharuan data diserahkan oleh Produsen Data kepada Wali Data

Secara umum, tata cara pembaharuan data statistik dan tematik lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5. 4 Tata Cara Pembaharuan Data Geospasial

BAB VI KETENTUAN UMUM PEMBANGUNAN SISTEM BASIS DATA PKP

6.1 KETENTUAN UMUM PEMBANGUNAN SISTEM BASIS DATA PKP

6.1.1 Umum

Pembangunan Basis Data PKP dilakukan oleh Pembina Data dan Wali Data. Adapun lingkup kegiatannya adalah : 1) penyiapan basis data; 2) pengolahan basis data; 3) implementasi sistem baru; dan 4) uji sistem.

Kegiatan penyiapan basis data difokuskan pada perancangan basis data, dimulai dari perancangan secara konseptual hingga perancangan secara fisik. Pengolahan basis data merupakan kegiatan untuk mengolah data-data yang nantinya akan menjadi input dan output dari basis data. Implementasi sistem baru merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan basis data yang sudah disiapkan. Sementara uji sistem merupakan kegiatan akhir terkait dengan menguji apakah sistem dapat berjalan dengan baik.

6.1.2 Penyiapan Basis Data

A. Perancangan Secara Konseptual

Pada tahap ini akan dihasilkan konsep awal basis data yang akan dirancang. Dalam perancangan secara konseptual ini, akan ditentukan kedalaman entitas data yang terlibat, mengidentifikasi jenis data pada tiap struktur data yang sudah disusun, serta pola keterhubungan data. Dalam skema konseptual, kita harus merinci keterhubungan data dengan memperhatikan data yang bersifat tunggal dan data yang bersifat penjumlahan.

B. Pemilihan DBMS

DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Terdapat berbagai macam DBMS, di antaranya MySQL, Oracle, Microsoft SQL server, dan Firebird. Masing-masing DBMS memiliki kekurangan dan kelebihan.

Pemilihan DBMS ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain : Teknik, Ekonomi dan Politik Organisasi.

1. Faktor Teknik :
 - a. Tipe model data
 - b. Struktur penyimpanan
 - c. Tipe interface dan programmer
 - d. Tipe bahasa query
2. Faktor Ekonomi :
 - a. Biaya penyediaan hardware dan software
 - b. Biaya konversi pembuatan basis data
 - c. Biaya personalia
 - d. Biaya pelatihan
 - e. Biaya pengopersian
 - f. Biaya pemeliharaan
3. Faktor organisasi :
 - a. Struktur organisasi
 - b. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu
 - c. Ketersediaan dari service vendor

C. Perancangan Secara Logika

Pada tahap ini hasil rancangan konseptual dituangkan ke dalam skema relational, yang selanjutnya diterjemahkan dalam skema pemrograman.

D. Perancangan Secara Fisik

Perancangan basis data secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file basis data untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan perancangan basis data secara fisik:

1. *Response time*

Waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi basis data yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan / perintah dari pengguna ataupun pengelola basis data

2. *Space utility*

Jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file basis data dan struktur-struktur jalur akses.

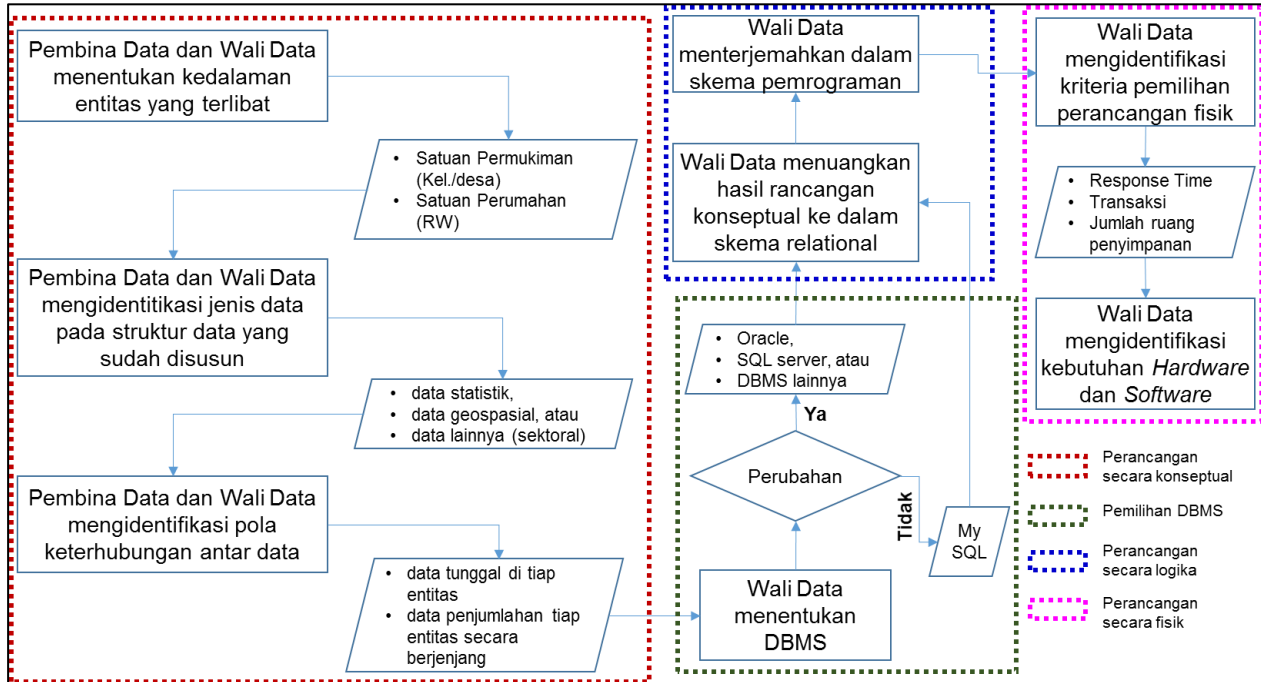
3. *Transaction throughput*

Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem basis data, dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi (misal : digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, bank, dan lain-lain).

Berdasarkan perencanaan terhadap basis data minimal yang akan disimpan, serta kebutuhan akan jaringan yang luas, maka dibutuhkan *hardware* dan *software* yang baik untuk komputer server, dengan indikasi spesifikasi hardware sebagai berikut :

- *Prosesor* : Eight-Core Processor
- *RAM* : 32 GB
- *Storage* : 1 TB
- *LAN CARD (NIC)* 2 unit support GigaByte
- *Operating System* (64 bit)

Tata cara penyiapan basis data secara lengkap dapat dilihat dalam skema pada gambar berikut ini.



Gambar 6. 1 Skema Tata Cara Penyiapan Basis Data

6.1.3 Pembaharuan Basis Data

Kegiatan pengolahan basis data sangat terkait dengan pembaharuan data, baik itu pembaharuan data statistik dan data tematik lainnya, maupun data geospasial. Pengolahan basis data menentukan pembaharuan basis data dapat dilakukan. Adapun lingkup pengolahan basis data adalah :

1. Penetapan dan penggunaan standardisasi data dalam Basis Data, melingkupi :
 - a. Standar kode wilayah, diarahkan menggunakan kode wilayah dari BPS
 - b. Standar jenis data (*integer* dan *chart*) dalam basis data
 - c. Standar format data isian tabel
 - d. Standar metadata
2. Penetapan mekanisme konversi data, baik konversi data numerik (dalam bentuk tabel), maupun konversi data geospasial, agar bisa digunakan dalam DBMS yang dipilih.

Contoh: dalam MySQL dilakukan onversi data statistik dalam format data isian tabel (xls. file) ke format csv. file, serta konversi data geospasial dari shp. file ke format geo json file (agar dapat digunakan di my sql).

6.1.4 Implementasi Sistem Baru

Metode implementasi sistem terdiri dari:

1. Pembuatan *Prototype*
Membangun *a working* model untuk aplikasi basis data. Tujuannya untuk mengidentifikasi fitur sistem bekerja dengan baik atau tidak. Dengan adanya *prototype* tersebut maka dilakukan *test drive* oleh pengguna untuk kemudian dievaluasi
2. Implementasi Sistem
Realisasi fisik basis data dan desain aplikasi
 - a. Implementasi skema basis data logik dan fisik ke dalam pernyataan DDL dan SDL dari DBMS yang telah dipilih, untuk

digunakan dalam pembuatan *file-file* basis data yang masih kosong.

- b. Program aplikasi untuk transaksi basis data dengan mengimplementasikan DML yang di *embeded* pada *host programming* (misal *Visual Basic*, C++, *Java*, *COBOL*)
- c. *Control security* dan integritas, dengan menggunakan SDL atau menggunakan *utilities* dari DBMS

6.1.5 Uji Sistem

Pengujian sistem untuk mengidentifikasi kesalahan – kesalahan / *bug* yang masih terjadi dalam basis data . Pengujian sistem terdiri dari:

1. Uji Dengan Sistem Acuan (*Uji Benchmark*)
 Uji acuan sistem dengan mengkomparasikan aplikasi sistem dasar.
 - a. Uji Keseluruhan Aplikasi Sistem (*Overall – Test & Pilot Project*)
 - b. Metode Pengujian *Blackbox*
 Memeriksa sintaks dan struktur logis internal dari *software*, biasanya pada tahap-tahap pengujian dengan cara:
 Menguji aplikasi melalui menu dalam “Tampilan Antarmuka”;
 Pengujian fungsi aplikasi “Pendukung”.
 - c. *Pilot project* skala kecil dengan pelaksanaan instalasi dan operasionalisasi
 Mekanisme operasional dan pemeliharaan sistem dalam bentuk Buku Manual Operasional dan Pemeliharaan Sistem.
2. Uji Pengguna Melalui Pelatihan Operator di Lingkungan Instansi Pengguna
 Dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan pengguna yang melibatkan calon-calon operator sistem terpilih.

6.2 KETENTUAN UMUM PEMELIHARAAN SISTEM BASIS DATA PKP

6.2.1 Pemeliharaan Konten Data

Pemeliharaan konten data yang dimaksud adalah untuk memastikan data untuk tiap konten data tidak ada kesalahan input data yang dilakukan oleh administrator data ataupun output data kepada pengguna. Adapun pengelolaan terhadap konten data, meliputi :

1. Pemeriksaan data masukan harus mempertimbangkan:
 - a. Penerapan masukan rangkap (*dual input*) atau mekanisme pengecekan masukan lainnya untuk mendeteksi kesalahan
 - b. Pengkajian secara berkala terhadap isi field data untuk mengkonfirmasi keabsahan dan integritas data;
 - c. Memeriksa dokumen cetak (*hard copy*) untuk memastikan tidak adanya perubahan data masukan yang tidak melalui otorisasi;
 - d. Menampilkan pesan yang sesuai dalam menanggapi kesalahan validasi;
 - e. Prosedur untuk menguji kewajaran dari data masukan;
 - f. Menguraikan tanggung jawab dari seluruh pegawai yang terkait dalam proses perekaman data; dan
 - g. Sistem mampu membuat dan mengeluarkan catatan aktivitas terkait proses perekaman data.
2. Menyusun daftar pemeriksaan (*check list*) yang sesuai, mendokumentasikan proses pemeriksaan, dan menyimpan hasilnya secara aman.
3. Pemeriksaan data keluaran harus mempertimbangkan:
 - a. Kewajaran dari data keluaran yang dihasilkan;
 - b. Pengendalian rekonsiliasi data untuk memastikan kebenaran pengolahan data;
 - c. Menyediakan informasi yang cukup untuk pengguna atau sistem pengolahan informasi untuk menentukan akurasi, kelengkapan, ketepatan, dan klasifikasi informasi;

- d. Prosedur untuk menindaklanjuti validasi data keluaran;
- e. Menguraikan tanggung jawab dari operator/admin terkait proses data keluaran; dan
- f. Sistem mampu membuat dan mengeluarkan catatan aktivitas dalam proses validasi data keluaran.

6.2.2 Pemeliharaan *Hardware* dan *Software*

Pemeliharaan *hardware* dan *software* yang dimaksud adalah untuk memastikan hardware dan software dapat berjalan dengan baik, sehingga transaksi pada basis data tidak terganggu. Adapun pemeliharaan terhadap *hardware* dan *software*, meliputi :

1. Setiap peralatan yang membutuhkan pemeliharaan harus memiliki catatan pemeliharaan yang berisi peralatan, tanggal pemeliharaan, hasil, dan kontak rinci;
2. Perangkat harus dipelihara secara berkala untuk menjamin ketersediaan, keutuhannya (*integrity*), dan fungsinya;
3. Perangkat harus dipelihara sesuai dengan petunjuk manualnya;
4. Pemeliharaan terhadap perangkat keras atau piranti lunak dilakukan oleh operator/admin yang berwenang;
5. Proses pemutakhiran piranti lunak operasional, aplikasi, kumpulan program (*library programme*) yang dilakukan oleh administrator sistem terlatih setelah melalui proses otorisasi; dan
6. Versi terdahulu dari suatu aplikasi harus tetap disimpan untuk keperluan kontinjensi.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN SDM

7.1 PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan basis data PKP, terdapat beberapa kegiatan dalam sistem kelembagaan yang harus dibiayai. Pembiayaan yang dimaksud meliputi:

1. Kegiatan dalam Forum Data
2. Kelembagaan Penyedia Basis Data beserta kegiatan yang mengikat padanya yaitu:
 - a. Pembina Data dalam melakukan pembinaan data
 - b. Wali Data dalam mengelola basis data
 - c. Koordinator Forum Data dalam mengkoordinasi pelaksanaan forum data
 - d. Produsen Data dalam memproduksi data

Adapun sumber dana yang dapat digunakan dalam pengembangan basis data adalah

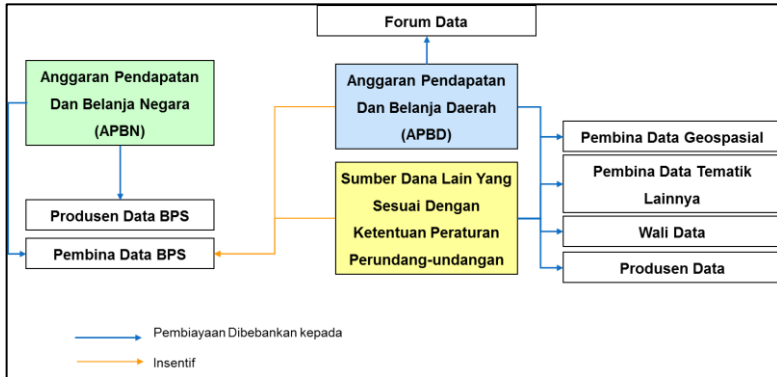
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber Dana Lain yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan pembiayaan ini, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi data mengikat pada tuisi tiap instansi yang menjadi produsen data, dan hal ini sudah masuk ke dalam anggaran rutin dari instansi tersebut
2. Terkait dengan anggaran yang dibebankan pada kegiatan rutin instansi sebagaimana diuraikan dalam poin 1, maka terdapat dua pembiayaan yaitu BPS dari APBN dan instansi lainnya dari APBD
3. Terkait dengan kegiatan di luar dari kegiatan produksi data, menjadi tanggungan dari APBD, meskipun dalam hal pembinaan

data terdapat BPS sebagai instansi vertikal, maka diberikan insentif.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka skema pembiayaan untuk pengembangan basis data PKP dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 7. 1 Skema Pembiayaan Pengembangan Basis Data PKP

7.2 SDM

Penyusunan dan pengolahan basis data Perumahan dan kawasan permukiman menuntut standar kualitas SDM yang minimal dapat mengoperasikan sistem informasi terkait basis data perumahan dan kawasan permukiman, proses yang dilakukan dalam penyusunan dan pengelolaan basis data ini terdiri dari pembangunan basis data yang mencakup penyiapan, pengolahan, implementasi, dan uji sistem basis data. Kemudian pengelolaan basis data mencakup pengelolaan konten data, pemeliharaan *hardware* dan *software*. Proses dalam pembangunan dan pengelolaan basis data ini tentu membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan cukup baik. SDM yang dimaksud ini harus dapat bekerja mengikuti perkembangan kebutuhan terhadap basis data, teknologi, serta dapat terus terjaga integritasnya.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan basis data, yaitu :

1. Peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan admin/operator dalam mengelola basis data, yang terdiri dari :
 - a. pendidikan, untuk meningkatkan pengetahuan melalui jenjang pendidikan terkait basis data
 - b. pelatihan, untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus ataupun pelatihan yang spesifik terkait pengelolaan basis data
2. Peningkatan kinerja untuk meningkatkan motivasi admin/operator dalam bekerja mengelola basis data, yang terdiri dari :
 - a. penentuan mekanisme peningkatan kesejahteraan, melalui sistem tunjangan tertentu
 - b. penentuan mekanisme sistem kinerja, melalui sistem kinerja tertentu yang menentukan gaji/fee yang diterima
3. Pembangunan karakter untuk membentuk karakter admin/operator yang berintegritas, yang terdiri dari :
 - a. perumusan kode etik admin/operator
 - b. penetapan sistem dalam penegakan disiplin

LAMPIRAN